

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2015 adalah dokumen Perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Gresik merupakan Penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 – 2015 pada tahun keempat dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2015 memuat arah kebijakan pembangunan, sasaran, uraian program dan kegiatan serta prioritas pembangunan, termasuk rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai alat untuk mengimplementasikan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi pendanaan dari APBD Kabupaten Gresik, APBD Provinsi Jawa Timur dan APBN, maupun dari investasi swasta dan partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan RKPD didasarkan pada penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2013.

Oleh karena itu dalam mekanisme perencanaan, secara substantif RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2015 mengintegrasikan program prioritas Pemerintah Pusat sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur,

program prioritas dalam RPJMD dan RPJPD Pemerintah Kabupaten Gresik maupun program prioritas hasil penjangkaran aspirasi yang telah diformulasikan melalui (Musrenbang) RKPD Kabupaten Gresik.

RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2015 memuat prioritas pembangunan, kerangka ekonomi dan keuangan daerah secara rinci dijabarkan dalam urusan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Penjabaran berdasarkan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan disusun dengan maksud untuk memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan dalam memanifestasikan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Gresik. Khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Kabupaten Gresik yang berkewajiban menyusun rencana program dan kegiatan APBD yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBD, APBD Provinsi, APBN, swasta, lembaga donor, swadaya masyarakat, dan sebagainya. Program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2015, menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Kabupaten Gresik Tahun 2015 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Gresik Tahun 2015.

Dengan demikian RKPD mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :

1. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan Pembangunan;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan
3. Menciptakan kepastian kebijakan pembangunan, karena merupakan komitmen pemerintah daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2015, antara lain meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
15. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

- Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2014;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur 2005-2015;
 20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;
 21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Gresik 2005-2025;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015.
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan komprehensif tahunan daerah, yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) serta menjadi acuan bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Gresik Tahun 2015. RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2015, disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015, serta mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015, serta memperhatikan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 sekaligus berfungsi

sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup seluruh Kabupaten Gresik.

RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2015 meliputi kegiatan Perencanaan Pembangunan yang mencakup wilayah seluruh Kabupaten Gresik. Selanjutnya RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2015 ini akan dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan KUA, PPA, RKA-SKPD, APBD dan diimplementasikan pelaksanaannya DPA-SKPD Tahun 2015, sehingga terwujud keterkaitan dan sinergi antara dokumen rencana dan anggaran tahunan daerah.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan yang berlaku di Kabupaten Gresik ini mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, adalah sebagai berikut:

1. RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2015 mengacu pada RKP Tahun 2015 dan RKPD Propinsi Jawa Timur Tahun 2015, RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015, serta mengintegrasikan rencana tata ruang daerah. Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah.
2. RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2015 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat serta prakiraan maju.
3. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
4. RKPD digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika penyajian Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2015 terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD serta maksud dan tujuan.

**BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CARA
PENCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

Menjelaskan gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

**BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH**

Memuat penjelasan tentang: (1) arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, yang meliputi kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah, (2) arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berisikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta prioritas pembangunan.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI : PENUTUP

Memuat kesimpulan dan kaidah pelaksanaan dari RKPD.

1.5. Maksud Dan Tujuan

RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2015 disusun dengan maksud sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Gresik tahun 2015.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Gresik;
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan di semua urusan pemerintahan daerah;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan, prioritas dan plafon anggaran pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun;
5. Menciptakan kepastian kebijakan perencanaan pembangunan.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

Kabupaten Gresik berada di antara 7 derajat dan 8 derajat Lintang Selatan serta antara 112 derajat dan 113 derajat Bujur Timur. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 2-12 meter di atas permukaan laut kecuali sebagian kecil di bagian utara (Kecamatan Panceng), yang mempunyai ketinggian sampai 25 meter di atas permukaan laut.

Bagian Utara Kabupaten Gresik dibatasi oleh Laut Jawa, bagian Timur dibatasi oleh Selat Madura, bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto dan Kota Surabaya, sementara bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.

Kabupaten Gresik mempunyai wilayah kepulauan, yaitu Pulau Bawean dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Luas wilayah Gresik seluruhnya 1.191,25 Km², terdiri dari 993,83 Km² luas wilayah daratan ditambah sekitar 197,42 Km² luas Pulau Bawean. Sedangkan luas wilayah perairan adalah 5.773,80 Km² yang potensial dalam subsektor perikanan laut dan .

Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang 140 Km, 69 Km di daratan memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Ujungpangkah, Sidayu dan Panceng, serta 71 Km di Kecamatan Tambak dan Sangkapura yang berada di Pulau Bawean.

Sebagian besar tanah di wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari jenis Aluvial, Grumusol, Mediteran Merah dan Litosol. Curah hujan di Kabupaten Gresik adalah relatif rendah, yaitu rata-rata 2.245 mm per tahun.

Berdasarkan ciri-ciri fisik tanahnya, Kabupaten Gresik dapat dibagi menjadi empat wilayah yaitu:

- a. Wilayah Kabupaten Gresik bagian Utara (meliputi wilayah Panceng, Ujung Pangkah, Sidayu, Bungah, Dukun, Manyar) adalah bagian dari daerah pegunungan Kapur Utara yang memiliki tanah relatif kurang subur (wilayah Kecamatan Panceng). Sebagian dari daerah ini adalah daerah hilir aliran Bengawan Solo yang bermuara di pantai Utara Kabupaten Gresik/Kecamatan Ujungpangkah. Daerah hilir Bengawan solo tersebut sangat potensial karena mampu menciptakan lahan yang cocok untuk

industri, perikanan, perkebunan, dan permukiman. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial terutama dengan adanya beberapa jenis bahan galian mineral non logam. Sebagian dari bahan mineral non logam ini telah dieksplorasi, dan sebagian lainnya sudah dalam taraf eksploitasi.

- b. Wilayah Kabupaten Gresik bagian Tengah (meliputi wilayah; Duduk Sampeyan, Balong Panggang, Benjeng, Cerme, Gresik, Kebomas) merupakan kawasan dengan tanah relatif subur. Di wilayah ini terdapat sungai-sungai kecil, antara lain Kali Lamong, Kali Corong, Kali Manyar, sehingga di bagian tengah wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian dan perikanan.
- c. Wilayah Kabupaten Gresik bagian Selatan (meliputi Menganti, Kedamean, Driyorejo dan Wringin Anom) adalah merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dan sebagian merupakan daerah berbukit sehingga di bagian selatan wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk industri, permukiman dan pertanian. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial terutama dengan adanya beberapa jenis bahan galian mineral non logam. Sebagian dari bahan mineral non logam ini telah dieksplorasi, dan sebagian lainnya sudah dalam taraf eksploitasi.
- d. Wilayah kepulauan Kabupaten Gresik berada di Pulau Bawean dan pulau kecil sekitarnya yang meliputi wilayah Kecamatan Sangkapura dan Tambak adalah merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dengan jenis tanah mediteran coklat kemerahan dan sebagian merupakan daerah berbukit sehingga di bagian wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian, pariwisata, dan perikanan. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial dengan adanya jenis bahan galian mineral non logam spesifik (batu onyx).

Sebagai wilayah pesisir yang juga telah difasilitasi dengan pelabuhan besar, maka Kabupaten Gresik memiliki akses perdagangan regional dan nasional. Keunggulan geografis ini menjadikan Gresik sebagai alternatif terbaik untuk investasi atau penanaman modal.

Keadaan permukaan air tanah di Wilayah Kabupaten Gresik pada umumnya relatif dalam, hanya daerah-daerah tertentu di sekitar sungai atau rawa-rawa saja yang mempunyai permukaan air tanah agak dangkal.

Pola aliran sungai di Kabupten Gresik memperlihatkan wilayah Gresik merupakan daerah muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong dan juga dilalui oleh Kali Surabaya di Wilayah Selatan. Sungai-sungai ini mempunyai sifat aliran dan kandungan unsur hara yang berbeda. Sungai Bengawan Solo mempunyai debit air yang cukup tinggi dengan membawa sedimen lebih banyak dibandingkan dengan Kali Lamong,

sehingga pendangkalan di Sungai Bengawan Solo lebih cepat. Dengan adanya peristiwa tersebut mengakibatkan timbulnya tanah-tanah oloran yang seringkali oleh penduduk dimanfaatkan untuk lahan perikanan.

Selain dialiri oleh sungai-sungai tersebut diatas keadaan hidrologi Kabupaten Gresik juga ditentukan oleh adanya waduk, embung, mata air, pompa air dan sumur bor.

Pada sebagian wilayah Kabupaten Gresik yang mempunyai dataran tinggi diatas 25 meter diatas permukaan laut, mempunyai kelerengan 2 – 15 %, serta adanya faktor pembatas alam berupa bentuk-bentuk batuan yang relatif sulit menyerap air (tanah clay) yang terdapat di Kecamatan Bungah dan Kecamatan Dukun. Kondisi di atas merupakan lahan kritis dan lahan yang sangat peka terhadap bencana alam.

Melihat kondisi di atas diindikasikan beberapa kawasan mempunyai kecenderungan terjadinya erosi akibat dari gerusan air, terutama air hujan. Daerah-daerah yang terkena bencana erosi sebagian besar wilayah Kabupaten Gresik, untuk DAS Kali Lamong meliputi Kecamatan Balongpanggang, Cerme, Benjeng, Kedamean, dan Menganti. Untuk DAS Bengawan Solo meliputi Kecamatan Dukun, Manyar, Bungah, Sidayu, dan Ujung Pangkah. Sedangkan DAS Kali Surabaya meliputi Kecamatan Wringinanom dan Driyorejo.

Sebagian kawasan pantai terdapat kawasan yang terabrasi dan intrusi air laut. Abrasi yang terjadi meliputi Kecamatan Bungah, Ujung Pangkah, Panceng, Sangkapura dan Tambak, Sedangkan Intrusi air laut terjadi di wilayah kecamatan Gresik, Kebomas, Manyar, Bungah, Sidayu dan Ujung Pangkah. Hal ini juga diperparah dengan adanya kawasan budidaya terbangun yang berbatasan langsung dengan garis pantai tanpa memperhatikan sempadan pantai yang semestinya bebas dari bangunan.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik, hingga akhir tahun 2013 memiliki total penduduk sejumlah 1.324.777 jiwa dan terdiri dari 667.601 laki-laki dan 657.176 perempuan, sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 1.307.995 jiwa sehingga dari tahun 2012 ke Tahun 2013 terjadi kenaikan jumlah penduduk sebanyak 16.782 jiwa atau 1,29 %. Jumlah keluarga di Kabupaten Gresik pada Tahun 2013 sebanyak 364.104 keluarga dan penduduk yang melebihi angka satu juta tersebut menghuni area wilayah seluas 1.191,25 Km², sehingga kemudian dapat dihitung ratio kepadatannya adalah sebesar 1.112 jiwa/km², dengan rata-rata per keluarga terdiri dari 4 orang.

Sedangkan angka rasio jenis kelamin laki-laki dibanding perempuan pada Tahun 2013 sebesar 101,59 % dan tingkat kepadatan penduduk Gresik tidak merata pada keseluruhan wilayah. Wilayah perkotaan di Kecamatan Gresik, Kebomas dan Manyar

dipadati penduduk sebesar 2.239 jiwa/km² dibandingkan wilayah pedesaan di 15 Kecamatan lainnya yang hanya dihuni 901 jiwa/km². Kondisi empiris ini tentu harus direspon secara objektif oleh pemerintah daerah, terutama menyangkut alokasi fasilitas dasar kebutuhan penduduk secara merata.

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Peran Pemerintah Daerah yang strategis, selain perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik adalah pelaksana pembangunan daerah yang berdampak kepada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakatnya. Keberhasilan pembangunan daerah, secara umum dapat dilihat secara langsung pada perkembangan atau perbaikan sarana prasarana fisik, selain itu keberhasilan pembangunan juga dapat diukur melalui indikator makro ekonomi karena pembangunan daerah dilaksanakan pada berbagai aspek kehidupan, yang antara lain diupayakan dengan melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi.

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja dan pemerataan pembagian pendapatan masyarakat. Pembangunan ekonomi mempunyai kedudukan yang amat penting, karena keberhasilan di bidang ekonomi dapat menyediakan sumber daya yang lebih luas bagi pembangunan di bidang lainnya. Untuk melakukan pembangunan diperlukan landasan yang kuat, yaitu pengambilan kebijakan yang tepat, dan terarah, supaya hasil yang dicapai akan benar-benar sesuai dengan yang direncanakan.

2.1.2.1. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

Kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi daerah secara umum dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi serta angka kemiskinan.

a. PDRB

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik pada tahun 2012 sebesar 7,43% dan tahun 2013 sebesar 6,98%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 sebesar 7,27% dan pada tahun 2013 sebesar 6,49% maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik masih lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Timur. Lebih lanjut, tingkat inflasi Kabupaten Gresik pada tahun 2013 sebesar 6,56% lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 5,97%. Salah satu penyebab kenaikan inflasi

pada tahun 2013 di Kabupaten Gresik yakni adanya kenaikan harga BBM secara nasional.

Inflasi pada tahun 2013 sebesar 6,56%, lebih tinggi dibanding pada tahun 2012 sebesar 5,97%. Hal ini disebabkan adanya kenaikan harga BBM.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2012 sebesar Rp Rp50.185.435.990.000,00, kemudian pada Tahun 2013 meningkat menjadi Rp57.209.069.730.000,00. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 pada tahun 2012 sebesar Rp19.424.161.630.000,00, kemudian pada Tahun 2013 meningkat menjadi Rp20.780.170.940.000,00.

Struktur ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2013 berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 48,67%, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 23,62%, dan Sektor Pertanian sebesar 7,52%. Demikian pula pada Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku juga masih didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 49,80%, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 23,92%, dan Sektor Pertanian sebesar 8,76%. Sehingga secara ekonomi Kabupaten Gresik adalah daerah Industri dan Perdagangan yang didukung oleh sektor Pertanian.

Ditinjau dari struktur perekonomian pada tahun 2012, pilar utamanya adalah sektor industri pengolahan. Terhadap PDRB atas dasar harga berlaku, sektor industri pengolahan menyumbang 50,23% dari seluruh konstruksi perekonomian Kabupaten Gresik. Dengan besarnya kontribusi sektor industri pengolahan tersebut akan ada kecenderungan semakin cepat berdiri industri baru yang merupakan mata rantai industri yang saling menunjang. Dengan demikian sektor industri pengolahan merupakan sektor yang bisa diharapkan untuk mempercepat pembangunan perekonomian di Kabupaten Gresik, karena sektor ini disamping menyerap banyak tenaga kerja juga mempunyai multiplier efek untuk menggerakkan perkembangan sektor yang lain.

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran merupakan sektor yang sangat erat dengan sektor Industri, pada tahun 2012 mempunyai sumbangan di urutan kedua, yaitu sebesar 23,92%. Sektor Pertanian mempunyai peranan di urutan ketiga yakni sebesar 8,76% di tahun 2012.

Ketiga sektor tersebut di atas selalu menunjukkan dominasi dari tahun ke tahun, oleh karena itu perlu terus didukung dengan kebijakan-kebijakan efektif yang menyangkut iklim usaha yang kondusif, sarana dan prasarana serta komitmen pengembangannya.

Sektor Jasa-Jasa berkontribusi sebesar 4,75%, Sektor Pertambangan dan Penggalan berkontribusi sebesar 4,18%, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi berkontribusi sebesar 3%, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan berkontribusi sebesar 2,87%, Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih berkontribusi sebesar 1,61%, dan Sektor Konstruksi berkontribusi sebesar 1,23%.

b. PDRB Perkapita

Pendapatan perkapita yang diukur dengan PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun dapat digunakan untuk melihat tingkat kemakmuran suatu daerah. Biasanya makin meningkat angka PDRB perkapita, maka kemakmuran juga diharapkan makin tinggi.

PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Gresik tahun 2011 sebesar Rp37.242.433,10 pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp4.714.283,75 sehingga menjadi Rp41.956.716,85

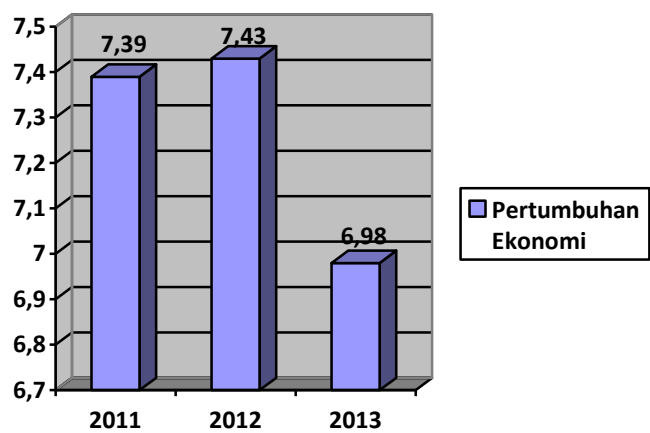
Perlu perhatian dalam membaca angka pendapatan perkapita sebagai indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah, karena masih mengandung beberapa kelemahan. Diantaranya adalah PDRB perkapita tidak memperhatikan distribusi pendapatan dan kepemilikan faktor produksi sehingga belum menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara riil.

Dari perspektif kesejahteraan masyarakat, kenaikan pendapatan perkapita tersebut memiliki makna sebagai kenaikan status ekonomi masyarakat pula. Dengan kata lain, kondisi empiris tersebut, mengindikasikan bahwa perekonomian daerah Kabupaten Gresik memang mengalami pergerakan positif hingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan penduduknya.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Kemajuan perekonomian Kabupaten Gresik berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi selama 3 tahun terakhir dapat dilihat melalui tabel berikut:

Grafik 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2011-2013



Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik sebesar 7,39%, kemudian pada tahun 2012 naik sebesar 0,04% menjadi 7,43%. Pada tahun 2013 ekonomi Kabupaten Gresik sebesar 6,98%, sehingga lebih rendah 0,45% dibanding pada Tahun 2012.

d. Inflasi

Struktur ekonomi, pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi merupakan ukuran makro tentang kondisi perekonomian di suatu daerah. Tingkat inflasi PDRB di Kabupaten Gresik pada tahun 2011 sebesar 5,91%, pada tahun 2012 naik menjadi sebesar 5,97%, namun pada tahun 2013 naik kembali menjadi 6,56%.

e. Angka kemiskinan

Berdasarkan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 terdapat rumah tangga Kelompok 1 yaitu rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah (paling miskin) sejumlah 42.575 rumah tangga atau sebanyak 179.192 jiwa. Kelompok 2 yaitu rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 11%-20% terendah sejumlah 27.426 rumah tangga atau sebanyak 101.127 jiwa. Kelompok 3 yaitu rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 21%-30% terendah sejumlah 27.425 rumah tangga atau 98.494 jiwa.

2.1.2.2. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tingkat kesejahteraan sosial masyarakat suatu daerah dapat diketahui antara lain melalui informasi capaian beberapa indikator dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.

a. Bidang Pendidikan, dilihat dari indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, dan angka partisipasi murni.

Angka Melek Huruf diukur dari persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana. Berdasarkan ukuran tersebut data tentang angka melek huruf di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Persentase Angka Melek Huruf Kabupaten Gresik Tahun 2010-2013

Tahun	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	Persentase
2010	660.118	100
2011	661.972	100
2012	846.674	100
2013	976.448	100

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kab. Gresik, 2013

Angka partisipasi murni diukur dari persentase jumlah siswa yang bersekolah pada kelompok usia sekolah, yang dibagi dalam kelompok SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, dan SMA/SMK/MA/Paket C. Berikut ini disajikan data angka partisipasi murni mulai dari kelompok SD, SMP, dan SMA pada tahun 2012.

Tabel 2.2. Angka Partisipasi Murni(APM) Kabupaten Gresik Tahun 2013

Kelompok Belajar	Jumlah Siswa	Jumlah Penduduk Kelompok Usia	APM
SD/MI/Paket A	116.224	117.938	98,55
SMP/MTs/Paket B	49.859	57.081	85,60
SMA/SMK/MA/Paket C	36.380	55.914	65,06

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kab. Gresik, 2013

b. Kesehatan, dilihat dari indikator Angka kelangsungan hidup bayi, Angka usia harapan hidup, dan Persentase balita gizi buruk mendapatkan perawatan.

Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan pada tahun 2012 sebesar 100% dihitung berdasarkan data jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satuan wilayah kerja pada kurun waktu tertentu sebanyak 139 bayi. Jumlah tersebut sama dengan jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di suatu wilayah kerja dalam waktu yang sama yaitu sebanyak 139 bayi.

c. Ketenagakerjaan, dilihat dari rasio penduduk yang berkerja.

Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Gresik juga mengalami problematika sebagaimana pada tingkat nasional. Berdasarkan data Dinas Tenaga kerja Kabupaten Gresik, jumlah angkatan kerja pada tahun 2013 sebanyak 692.750 orang, sedangkan penduduk yang bekerja sebanyak 813.851 orang. Dengan demikian rasio penduduk yang bekerja sebesar 813.851 dibanding 692.750 atau%.

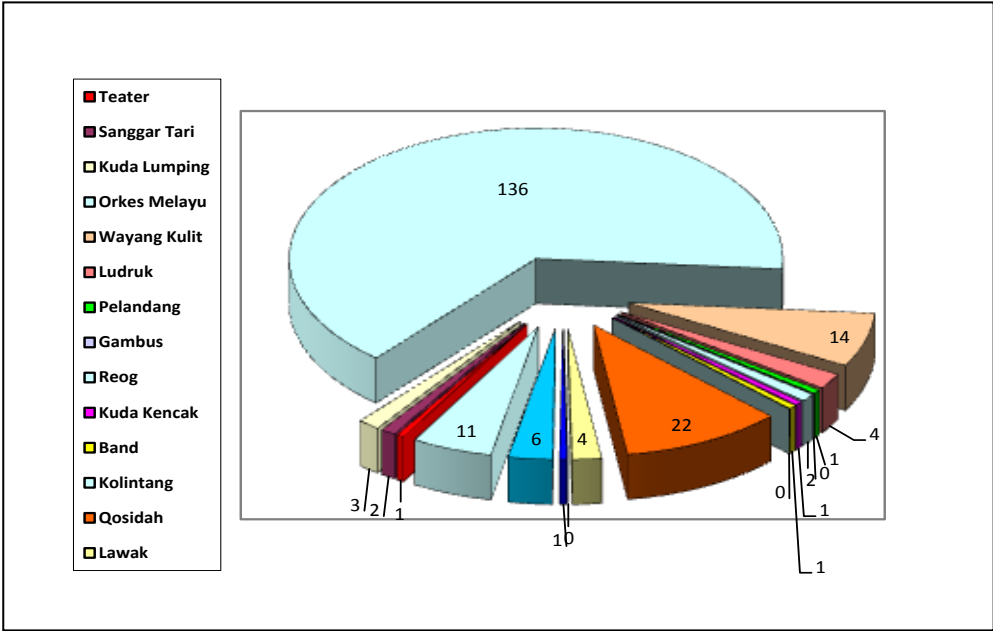
2.1.2.3. FOKUS SENI DAN BUDAYA

Kabupaten Gresik memiliki khasanah kesenian daerah, tradisional dan modern yang cukup kaya serta variatif. Jenis kesenian yang ada sebagian bersifat modern, seperti Band (6 group) dan terbanyak Orkes melayu (sebanyak 177 group). Sedangkan jenis kesenian yang bercorak tradisional juga sangat banyak dan variatif, seperti: karawitan (11), ludruk (4), Kuda Kencak (2), reog (2), wayang kulit (14), Mocopat (1), sandur madura (1) dan pelandang (1).

Secara endemik juga terdapat unit kesenian yang berkarakteristik keagamaan seperti: samroh (5), hadrah dan qosidah (11). Kekayaan kesenian daerah yang banyak dan variatif ini merupakan produk kebudayaan dan peradaban masyarakat yang heterogen dan kreatif. Di masa depan potensi ini perlu dilestarikan, didukung bahkan dikembangkan dengan kebijakan serta program-program pemerintah daerah yang tepat.

Data tentang kelompok kesenian di Kabupaten Gresik pada tahun 2012 secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut:

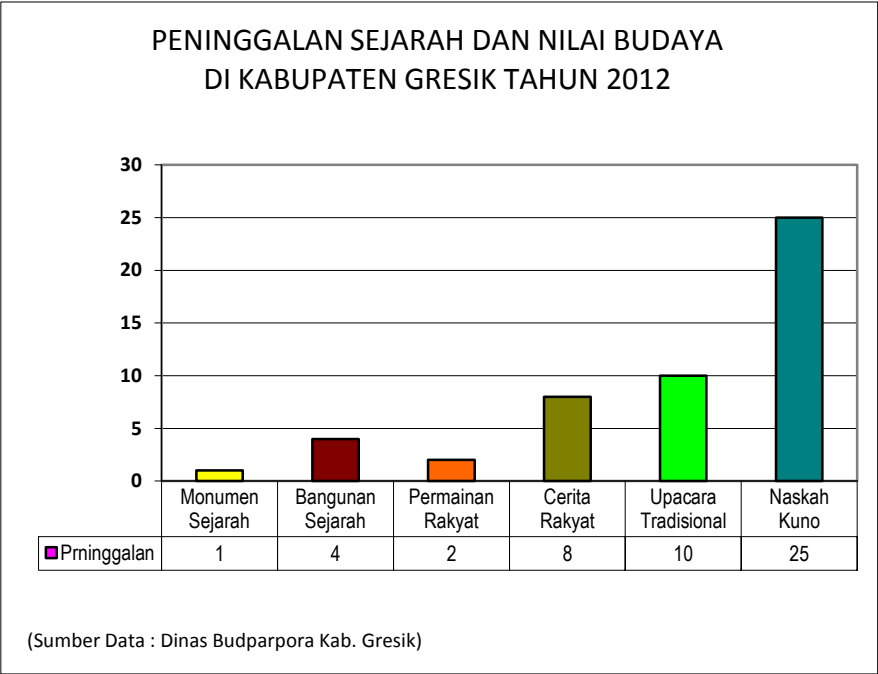
Grafik 2.2 Data Organisasi Kesenian Di Kabupaten Gresik Tahun 2012



(Sumber Data : Buku Gresik Dalam Angka, 2013)

Ditinjau dari sejarah dan nilai budaya yang ada di kabupaten Gresik, ditemukan peninggalan sejarah yang memiliki nilai budaya sebagai berikut:

Grafik 2.3. Peninggalan Sejarah dan Nilai Budaya Di Kabupaten Gresik Tahun 2012



Berdasarkan grafik tersebut diatas, berdasarkan inventarisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik sampai dengan tahun 2012 bahwa terdapat tidak kurang dari 25 naskah kuno, 10 jenis upacara tradisional, 8 cerita rakyat, 4 bangunan sejarah, 2 jenis permainan rakyat dan 1 buah monumen sejarah. Data temuan bersejarah dan nilai budaya ini berkonsekuensi bahwa di masa depan perlu dilakukan upaya atau program pelestarian dan pengembangan budaya daerah.

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Tujuan keberadaan pemerintah kabupaten adalah untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Aspek pelayanan umum yang harus diberikan adalah sebagai berikut:

2.1.3.1. FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB

a. Pendidikan

Pelayanan umum untuk urusan pendidikan yang telah dilaksanakan selama tahun 2013 adalah pelayanan kepada anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal. Pelayanan pendidikan ini meliputi aspek kualitas pendidikan, akseptabilitas pendidikan dan manajemen pendidikan. Beberapa indikator yang telah dicapai selama tahun 2013 adalah:

Tabel 2.3. Pelayanan Urusan Pendidikan Tahun 2011 -2013

NO.	FOKUS PELAYANAN	2011	2012	2013
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$(62.170/73.350) \times 100 \% = 84,76 \%$	$(39.212/62.170) \times 100 \% = 63,07 \%$	$(39.220/56.531) \times 100 \% = 69,38 \%$
2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	$(661.972 / 661.972) \times 100\% = 100\%$	$(481.515 / 481.515) \times 100\% = 100\%$	$(976.448 / 976.448) \times 100\% = 100\%$
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	$(114.908 / 123.851) \times 100\% = 92,78\%$	$(115.801 / 118.138) \times 100\% = 98,02\%$	$(116.224 / 117.938) \times 100\% = 98,55\%$
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	$(50.460 / 58.954) \times 100\% = 85.59\%$	$(50.458/58.954) \times 100\% = 85.59\%$	$(49.859/57.081) \times 100\% = 85.60\%$
5	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	$(47.204 / 54.914) \times 100\% = 85.96\%$	$(35.780 / 54.914) \times 100\% = 65.03\%$	$(36.380 / 55.914) \times 100\% = 65.06\%$
6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	$(93 / 124.990) \times 100\% = 0,07\%$	$(59 / 127.990) \times 100\% = 0,05\%$	$(82 / 127.292) \times 100\% = 0,06\%$
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	$(135 / 54.265) \times 100\% = 0,25\%$	$(94 / 54.247) \times 100\% = 0,17\%$	$(71 / 56.217) \times 100\% = 0,13\%$

NO.	FOKUS PELAYANAN	2011	2012	2013
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	$(188 / 39.016) \times 100\% = \mathbf{0,48\%}$	$(195 / 45.360) \times 100\% = \mathbf{0,43\%}$	$(150 / 46.429) \times 100\% = \mathbf{0,32\%}$
9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	$(19.050 / 19.050) \times 100\% = \mathbf{100\%}$	$(18.950 / 18.950) \times 100\% = \mathbf{100\%}$	$(20.819 / 20.819) \times 100\% = \mathbf{100\%}$
10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	$(17.295 / 17.295) \times 100\% = \mathbf{100\%}$	$(17.531 / 17.531) \times 100\% = \mathbf{100\%}$	$(17.548 / 17.548) \times 100\% = \mathbf{100\%}$
11	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	$(11.932 / 11.932) \times 100\% = \mathbf{100\%}$	$(11.997 / 11.997) \times 100\% = \mathbf{100\%}$	$(12.989 / 12.989) \times 100\% = \mathbf{100\%}$
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	$(17.791 / 18.257) \times 100\% = \mathbf{97,45\%}$	$(17.940 / 19.050) \times 100\% = \mathbf{94,17\%}$	$(19.855 / 20.819) \times 100\% = \mathbf{95,37\%}$
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	$(14.319 / 14.319) \times 100\% = \mathbf{100\%}$	$(15.687 / 17.295) \times 100\% = \mathbf{90,70\%}$	$(15.509 / 17.293) \times 100\% = \mathbf{89,68\%}$
14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	$(15.922 / 19.580) \times 100\% = \mathbf{81.32\%}$	$(18.387 / 22.469) \times 100\% = \mathbf{81.83\%}$	$(15.509 / 12.803) \times 100\% = \mathbf{88.62\%}$

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kab. Gresik, 2013

b. Kesehatan

Pelayanan umum untuk urusan kesehatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten meliputi pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak, penanggulangan pemnyakit menular, pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, serta pelayanan Keluarga berencana.

Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2011 – 2013

Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Gresik selama tahun 2011-2013 yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat telah terpenuhi sebagai berikut:

Tabel 2.4 Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2011-2013

NO.	SARANA PELAYANAN	JUMLAH		
		2011	2012	2013
1	RUMAH SAKIT UMUM	7	9	
2	RUMAH SAKIT JIWA	-	-	-
3	RUMAH SAKIT BERSALIN	-	-	-
4	RUMAH SAKIT KHUSUS LAINNYA	-	-	-
5	PUSKESMAS	32	32	32
6	PUSKESMAS PEMBANTU	77	77	77
7	PUSKESMAS KELILING	34	34	34
8	POSYANDU	1455	1457	1468

9	POLINDES	222	280	
10	RUMAH BERSALIN	-	-	-
11	BALAI PENGOBATAN/KLINIK	61	71	
12	APOTIK	102	102	
13	TOKO OBAT	14	17	
14	GFK	1	1	1

Hasil Kegiatan Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4). Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan, Ibu Hamil Risti yang Dirujuk di Kabupaten Gresik

Capaian SPM untuk pelayanan kesehatan ibu hamil selama tahun 2011-2013 adalah:

Tabel 2.5 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2011-2013

NO	URAIAN	CAPAIAN		
		2011	2012	2013
1	Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4	87,58%	82,52%	82,56%
2	Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes	98,45%	88,97%	89,39%
3	Cakupan Pelayanan Nifas			87,74%

Hasil Kegiatan Cakupan Kunjungan Neonatus dan Cakupan kunjungan Bayi

Capaian SPM untuk pelayanan kesehatan bayi selama tahun 2011-2013 adalah:

Tabel 2.6 Pelayanan Kesehatan Bayi Tahun 2011-2013

NO.	URAIAN	CAPAIAN		
		2011	2012	2013
1.	Cakupan kunjungan neonatus	31,89%	61,91%	60,53%
2.	Cakupan kunjungan bayi	99,34%	102,6%	95,52%

Sumber Data : Dinas Kesehatan tahun 2013

Hasil Kegiatan Cakupan KB Aktif

Capaian SPM untuk pelayanan Keluarga Berencana selama tahun 2011-2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Pelayanan Keluarga Berencana Tahun 2011-2013

NO.	URAIAN	CAPAIAN		
		2011	2012	2013
1.	Peserta Program KB aktif	78,69%	78 %	78,68 %

Jumlah Posyandu, Jumlah Kader dan Jumlah Desa Siaga

Capaian jumlah pelayanan posyandu dan penyehatan masyarakat yang dilaksanakan tahun 2011-2013 adalah sebagaimana table berikut :

Tabel 2.8 Pelayanan Posyandu dan Penyehatan Masyarakat

NO.	URAIAN	CAPAIAN		
		2011	2012	2013
1.	Jumlah Posyandu	1455	1457	1468
	- Pratama	1.03 %	1.03 %	
	- Madya	21.17 %	21.27 %	
	- Purnama	68.86 %	68.63 %	75,34%
	- Mandiri	8.93 %	9.06 %	
2.	Jumlah Kader	7.174	9.121	
	- Kader Dilatih	71.76 %	21.28 %	
	- Kader Aktif	100 %	100 %	

c. Lingkungan Hidup

Sasaran urusan lingkungan hidup:

- a. meningkatkan Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan indicator utama: Luas Lahan Kritis, Rasio Luas Kawasan lindung, Persentase jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, Persentase jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara, dan Luas RTH Perkotaan.
- b. Meningkatkan penanganan persampahan dengan indikator kinerja utama: Penanganan sampah, Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, dan Pembangunan Pengolahan Sampah Terpadu.

Data terkait kinerja pelayanan bidang lingkungan hidup, dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2.9 Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2012-2013

No.	FOKUS PELAYANAN	2012	2013
1	Luas lahan kritis	16.960,58 Ha	10,960,58
2	Rasio luas kawasan lindung	14.004,64/119.125x100= 11,75%	Di Bappeda
3	Jumlah perusahaan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	55 Perusahaan	58 Perusahaan
4	Jumlah perusahaan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	104 Perusahaan	153 Perusahaan
5	Luas ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan	917,066 Ha	716,35 Ha
6	Penanganan sampah	(727 /780) x 100% = 93%	(740 /796,6) x 100% = 93%

7	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	$(578 / 1.307.995) = 0,044$	$664 / 1.322.710) = 0,050$
---	--	-----------------------------	----------------------------

Sumber Data : Badan Lingkungan Hidup Kab. Gresik, 2013

Tabel 2.10 Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2013

No.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI 2011	REALISASI 2012	REALISASI 2013
1.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.			
2.	Penegakan hukum lingkungan			
3.	Rumah tangga pengguna air bersih	58%	72,46%	53,87%
4.	Lingkungan pemukiman kumuh	0,86%	0,86%	0,86%
5.	Rumah layak huni	76,84%	87,01%	84,77%

Sumber Data : B L H dan Dinas P U. Kab. Gresik, 2013.

d. Sarana dan Prasarana Umum

Pelayanan prasarana umum di bidang keagamaan adalah mewujudkan ketersediaan tempat ibadah bagi masyarakat. Tempat ibadah sebagai tempat untuk pembinaan pribadi dan perilaku masyarakat manjadi kebutuhan utama bagi terwujudnya perilaku masyarakat yang santun, damai dan kondusif .

Tabel 2.11 Pelayanan Tempat Ibadah Tahun 2012-2013

NO.	NAMA TEMPAT	JUMLAH 2012	JUMLAH 2013
1.	Masjid	1.053	1104
2.	Musholla	2.836	2701
3.	Gereja	21	13
4.	Pura	4	5
5.	Wihara	1	1

Sumber Data : Bagian Adm. Kesra Setda Kab. Gresik, 2012-2013

Pelayanan pada urusan Pekerjaan Umum yang ingin dicapai adalah menyiapkan infrastruktur daerah dengan indikator kinerja utama: jalan kabupaten dalam kondisi baik, Jembatan kabupaten dalam kondisi baik, pelayanan jaringan irigasi, dan saluran drainase perkotaan.

Tabel 2.12 Pelayanan Prasarana Umum Tahun 2012- 2013

NO.	FOKUS PELAYANAN	2012	2013
1.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	$(363,94 / 512,16) \times 100\%$ = 71,06%	$(381,06 / 512,16) \times 100\%$ = 74,40%
2.	Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik	$(216/221)\times100$ = 98%	$(277,8/297)\times100$ = 93,54%

3.	Panjang jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	$(8.509,4 / 16.286) \times 100\% = \mathbf{52,25\%}$	$(8.678,24 / 16.286) \times 100\% = \mathbf{53,29\%}$
4.	Panjang saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik	$(81.738,37/139.939) \times 100 = \mathbf{58,41\%}$	$(85.938/139.939) \times 100 = \mathbf{61,41\%}$

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Gresik, 2012

e. Tata Ruang

Penataan ruang di Kabupaten Gresik adalah untuk memberikan arahan Pemerintah, masyarakat dan pihak ketiga lainnya dalam mengalokasikan ruang sebagai tempat kegiatan baik bersifat ekonomis, sosial maupun budaya. Pelayanan urusan penataan ruang adalah meningkatkan penataan kawasan daerah sesuai RTRW dengan indikator kinerja utama: Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah.

Sebagai tindak lanjut dari penetapan RTRW tahun 2010-2030 maka akan dilakukan riview RTDR sekaligus proses perdanya. Untuk keberadaan RTH di wilayah perkotaan, Pemerintah Kabupaten Gresik merencanakan Perluasan RTH sesuai dengan Permen PU.

Tabel 2.13 Pelayanan Urusan Tata Ruang Tahun 2012-2013

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI 2012	REALISASI 2013
1.	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	$(712,36 / 28.808,11) \times 100\% = \mathbf{28,89\%}$	

Sumber Data : Dinas PU Kab. Gresik, 2012

f. Perhubungan

Sasaran urusan perhubungan adalah meningkatkan pelayanan transportasi daerah yang Aman, Lancar, dan Terjangkau dengan indikator kinerja utama: Persentase ketersediaan angkutan darat, Persentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas, Persentase angkutan umum darat dalam kondisi layak jalan, dan Ketersediaan angkutan laut (penyeberangan).

Tabel 2.14 Pelayanan Urusan Perhubungan Tahun 2012-2013

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI 2012	REALISASI 2013
1.	Angkutan darat	$(1.112 / 9.095.800) \times 100\% = \mathbf{0,012\%}$	$1.160 / 1.425.357) \times 100\% = \mathbf{81,45\%}$

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kab. Gresik, 2013

g. Penanaman Modal

Hasil dari pelaksanaan urusan penanaman modal adalah meningkatnya nilai penanaman modal di daerah. Penanaman modal di daerah terdiri dari penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal setempat/lokal. Ketiga jenis penanaman modal ini akan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat kabupaten secara keseluruhan.

Tabel 2.15 Pelayanan Urusan Penanaman Modal Tahun 2012-2013

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI 2012	REALISASI 2013
1.	Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	$(898,945.232.910 - 876.800.679.387) / 876.800.679.387 \times 100\% = 2,52 \%$	$(942.527.896.627 - 898.945.232.910) / 898.945.232.910 \times 100\% = 4,85 \%$

Sumber Data : Badan Perizinan dan PM Kab. Gresik, 2012

h. Koperasi

Hasil dari pelaksanaan urusan koperasi dan UMKM adalah kemampuan daerah untuk menggerakkan usaha yang berbasis kepada koperasi, usaha mikro dan usaha kecil. Keberpihakan pemerintah kepada sektor ini akan mampu meningkatkan jumlah dan kemampuan usahanya. Pada tahun 2012 jumlah koperasi dan koperasi aktif serta jumlah usaha mikro dan kecil adalah:

Tabel 2.16 Pelayanan Urusan Koperasi Tahun 2012-2013

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI 2012	REALISASI 2013
1.	Koperasi aktif	$(965 / 1.159) \times 100\% = 83\%$	$(974 / 1.169) \times 100\% = 83,32\%$
2.	Usaha Mikro dan Kecil	$(26.260 / 36.650) \times 100\% = 71,65\%$	$(36.361 / 36.650) \times 100\% = 98,80\%$

Sumber Data : Dinas Koperasi Kab. Gresik, 2012

i. Kependudukan

Administrasi kependudukan merupakan amanat dari pemerintah pusat untuk mendapat perbaikan. Database kependudukan yang baik merupakan sumber data yang sangat diperlukan untuk segala keperluan. Pemerintah melalui program nasional telah membangun data kependudukan secara nasional melalui KTP nasional berbasis NIK. Selain itu pelayanan akta kependudukan juga menjadi prioritas pelayanan untuk masyarakat.

Tabel 2.17 Pelayanan Urusan Kependudukan Tahun 2012-2013

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI 2012	REALISASI 2013
1.	Kepemilikan KTP	$(793.225 / 980.476) \times 100\% = 81,8\%$	$(968.221 / 1.480.837) \times 100\% = 65,38\%$
2.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	$(273.517 / 1248.1977) \times 100\% = 106,67$	$(13.562 / 968.221) \times 100\% = 1,04\%$
3.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah

Sumber Data : Dinas Kependudukan, Capil dan Sosial Kab. Gresik, 2012

j. Tenaga Kerja

Urusan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten untuk memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memberikan kebutuhan akan lapangan pekerjaan. Pemerintah kabupaten harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan baik melalui fasilitasi maupun pembangunan di daerah.

Tabel 2.18 Pelayanan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2012-2013

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI 2012	REALISASI 2013
1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	$(931.220 / 608.653 \times 100\% = 71,1\%$	$(692.750 / 1.030.702 \times 100\% = 67,21\%$
2.	Pencari kerja yang ditempatkan	$(1.057 / 3.198) \times 100\% = 33\%$	$(2.152 / 7.482) \times 100\% = 28,76\%$

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik, 2012

k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditujukan untuk memberikan peluang yang sama kepada perempuan dalam berpartisipasi dalam pembangunan sekaligus memberikan perlindungan dari ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu peran serta perempuan dalam pembangunan harus selalu ditingkatkan.

Anak sebagai unsur masyarakat harus dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkatan usianya. Pemerintah kabupaten harus dapat memastikan tidak terjadi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Karena beberapa alasan masih sering dijumpai orang tua yang mempekerjakan anak-anak untuk membantu memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya.

Tabel 2.19 Fokus Pelayanan Tahun 2012-2013

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI-2012	REALISASI-2013
1.	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	$(4.931 / 42.337) \times 100\%$ = 25,07%	
2.	Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas	$(374.159 / 374.159) \times 100\%$ = 100%	
3.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	$(1.147 / 199.990 \times 100\%$ = 00,57%	

Sumber Data : Bappeda Kab. Gresik, 2012

I. Keluarga Berencana

Hasil pelaksanaan urusan keluarga berencana difokuskan pada pelayanan kepada kepesertaan program Keluarga Berencana. Program ini oleh masyarakat sangat dirasakan manfaatnya karena mampu membantu mereka dalam merencanakan kehidupan keluarganya. Selain pelayanan program KB, yang dilaksanakan adalah melakukan pembinaan keluarga agar kualitas kehidupan dalam keluarga semakin baik. Masih tingginya keluarga miskin yang ada di masyarakat mendorong upaya yang lebih baik dari pemerintah untuk menguranginya.

Tabel 2.20 Pelayanan Urusan Keluarga Berencana Tahun 2012-2013

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI 2012	REALISASI 2013
1.	Prevalensi peserta KB aktif	$(186.368 / 214.814) \times 100\%$ = 87%	$(183.152 / 232.768) \times 100\%$ = 78,68%
2.	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi.	$(27.624 / 228.831) \times 100\%$ = 12,07%	$(43.040 / 232.768) \times 100\%$ = 18,50%

Sumber Data : Badan KB dan PP Kab. Gresik, 2013

m. Komunikasi dan Informatika

Fokus pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika adalah menyediakan media informasi dan komunikasi oleh pemerintah sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Sarana komunikasi dan informatika diperlukan untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga dapat diminalisasikan kesenjangan informasi.

Tabel 2.21 Pelayanan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2012-2013

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI 2012	REALISASI 2013
1.	Web site milik pemerintah daerah	Ada	Ada
2.	Pameran/expo	7 kali	30 kali

3.	Jumlah Pengunjung Website	665,113 netter	716.907 netter
4.	Sistem Informasi Manajemen	27 SIM	30 SIM

Sumber Data : Bagian PDTI Setda Kab. Gresik, 2013

m. Pertanahan

Sasaran urusan pertanahan adalah meningkatkan penanganan pertanahan dengan indikator utama Penyelesaian Kasus Tanah Negara, penyelesaian TKD, pembebasan lahan untuk kepentingan umum meliputi : penetapan lokasi, sosialisasi, pematokan, pengukuran, appraisal, negosiasi harga, pendataan tanah, tanaman, bangunan, pemberkasan dan pembayaran.

Table 2.22 Pelayanan Urusan Pertanahan Tahun 2012-2013

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI 2012	REALISASI 2013
1.	Luas lahan bersertifikat	(34.979 / 119.513) x 100% = 28,27	
2.	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	(18 / 18 x 100% = 100%	(2 / 2 x 100% = 100%
3.	Penyelesaian Ijin Lokasi	(35 / 35) x 100% = 100%	(40 / 62) x 100% =64,52%

Sumber Data : Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kab. Gresik, 2012

n. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam rangka memberdayakan masyarakat desa, masyarakat di Kabupaten Gresik telah dilibatkan secara penuh pada kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Gresik, Kebomas, Manyar, Menganti dan Driyorejo yang tersebar pada 103 Desa/Kelurahan serta PNPM Mandiri Pedesaan di 13 Kecamatan.

Tabel 2.23 Pelayanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2012-2013

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI 2012	REALISASI 2013
1.	PKK aktif	(24.178 / 24.178) x 100% = 100%	(43.762 / 43.762) x 100% = 100%
2.	Posyandu	(1.461 / 1.461) x 100% = 100%	(1.444 / 1.444) x 100% = 100%

Sumber Data : Bapemas Kab. Gresik, 2013

o. Perpustakaan dan Arsip

Hasil pelaksanaan urusan perpustakaan dan kearsipan diukur melalui pelayanan terhadap ketersediaan bahan bacaan pada perpustakaan umum maupun keberadaan perpustakaan sekolah dan desa. Keberadaan perpustakaan ini untuk meningkatkan minat baca masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan

masyarakat. Sedangkan urusan kearsipan ditujukan untuk membangun sistem kearsipan yang aman dan handal sehingga seluruh arsip pemerintah dapat terjamin keamanan dan keandalannya.

Tabel 2.24 Pelayanan Urusan Perpustakaan dan Arsip Tahun 2012-2013

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI 2012	REALISASI 2013
1.	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	(56/56)x100% = 100%	(334/413x100% = 80%
2.	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	36 Kali	36 Kali
3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	85,71%	96,35%
4.	Pengunjung perpustakaan	1,307,995	1,371,507

Sumber Data : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Gresik, 2013

p. Budaya

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan urusan budaya adalah terpeliharanya seni dan budaya daerah sebagai kekayaan budaya daerah. Oleh karena itu festival seni yang secara rutin dilaksanakan serta sarana budaya yang mencukupi menjadi perhatian yang utama bagi pemerintah kabupaten. Selain itu benda-benda cagar budaya yang ada juga harus senantiasa dijaga dan dilestarikan.

Tabel 2.25 Pelayanan Urusan Budaya Tahun 2012-2013

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI 2012	REALISASI 2013
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	12 kali	9 kali
2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	4 buah	4 buah
3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	(38 / 38) x100% = 100%	(38 / 38) x100% = 100%

Sumber Data Dinas Budparpora Kab. Gresik, 2013

q. Pemuda dan Olah Raga

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan urusan pemuda dan olah raga adalah meningkatnya prestasi olahraga dan pemuda di daerah. Peningkatan prestasi olahraga harus didukung dengan pembinaan dan penyediaan sarana olahraga yang memadai. Sedangkan untuk pembinaan pemuda diharapkan pemerintah kabupaten dapat menyediakan aktivitas yang positif bagi pemuda yang ada.

Tabel 2.26 Pelayanan Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2012-2013

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI 2012	REALISASI 2013
1.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	2	3
2.	Lapangan olahraga	218	24

Sumber Data : Dinas Budparpora Kab. Gresik, 2013

2.1.3.2. FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

Analisis kinerja layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintah daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi , sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian

a. Kelautan dan Perikanan

Urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengelola dan mengeksplotasi laut bagi kemakmuran masyarakat. Upaya untuk meningkatkan produksi perikanan baik perikanan budidaya, perairan umum maupun kelautan akan menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah. Meningkatnya produksi perikanan ini akan meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat yang berfungsi untuk meningkatkan gizi masyarakat.

Tabel 2.27 Pelayanan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2012

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI 2012	REALISASI 2013
1.	Produksi perikanan	$(51.064,88 / 51.136,50) \times 100\% = \mathbf{130\%}$	$(44.866,42 / 17.335,02) \times 100\% = \mathbf{259\%}$
2.	Konsumsi ikan	$(25,16 / 25,40) \times 100\% = \mathbf{97,99\%}$	

Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gresik, 2013

b. Pertanian dan Kehutanan

Urusan pertanian dan kehutanan dikelola untuk meningkatkan produksi pertanian dan kehutanan sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Sedangkan untuk kehutanan selain meningkatkan produksi hasil hutan, hal yang lebih penting untuk dilakukan adalah melakukan konservasi dan memelihara fungsi hutan sebagaimana mestinya.

Tabel 2.28 Pelayanan Urusan Pertanian dan Kehutanan Tahun 2012-2013

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI 2012	REALISASI 2013
1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	$(379.132,08 / 54.912) \times 100\% = 55,04\%$	
2.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2011**)	$(3.962.924 / 44.330.663) \times 100\% = 8,94\%$	
3.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	$(702,50 / 22.619,44) \times 100\% = 3,10\%$	$(77,23 / 5.897) \times 100\% = 1,31\%$
4.	Kerusakan Kawasan Hutan	$(0 / 4.844) \times 100\% = 0\%$	

Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Gresik, 2012

c. Perindustrian dan Perdagangan

Urusan perindustrian dan perdagangan dilaksanakan melalui regulasi dan stimulasi terhadap kegiatan ekonomi khususnya dari perindustrian dan perdagangan. Pembinaan terhadap industri kecil dan menengah menjadi prioritas bagi pemerintah kabupaten. Sedangkan penyediaan sarana perdagangan dan pasar komoditas akan mapu meningkatkan volume perdagangan.

Tabel 2.29 Pelayanan Urusan Indutri dan Perdagangan Tahun 2012-2013

NO.	FOKUS PELAYANAN	REALISASI 2012	REALISASI 2013
1.	Pertumbuhan Industri	$(199 - 167) / 6.599 \times 100\% = 0,49\%$	
2.	Ekspor Bersih Perdagangan	$Rp.1.635.920.364,54,0 - Rp.50.670.231,00 = 2.489.845.040,00$	

Sumber Data : Dinas Koperasi, Perindag dan UKM Kab. Gresik, 2012

2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik maupun internasional. Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah di Kabupaten Gresik dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Kabupaten Gresik adalah salah satu dari wilayah penyangga kota Surabaya (*Surabaya Metropolitan Area*). Dimana Kota Surabaya adalah ibu kota sekaligus pusat ekonomi Jawa Timur dan kawasan Indonesia Timur.

Di samping Kabupaten Gresik, daerah lain yang juga dapat dikatakan sebagai kawasan penyangga Kota Surabaya adalah Kabupaten Sidoarjo, Bangkalan, Mojokerto dan Lamongan. Keenam wilayah ini dikenal dengan istilah kawasan Gerbangkertosusila. Fungsi wilayah penyangga bagi Kabupaten Gresik dapat bernilai positif secara ekonomis, jika Kabupaten Gresik dapat mengantisipasi dengan baik kejenuhan perkembangan kegiatan industri, perdagangan dan jasa, serta permukiman Kota Surabaya, yaitu dengan menyediakan lahan alternatif pembangunan kawasan industri, perdagangan dan jasa, serta permukiman yang representatif, kondusif, dan strategis.

Ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Gresik yang mendukung daya saing Kabupaten Gresik antara lain:

- a. Jalan Tol Surabaya – Gresik .
- b. Jalan Nasional sebagai jalan Arteri primer (Surabaya – Gresik – Lamongan)
- c. Jalan Nasional sebagai jalan Kolektor Primer (Gresik – Sadang lewat Pantura / Jl. Daendels).
- d. Jalan Propinsi sebagai jalan Kolektor Primer (Legundi – Bunder, Lakarsantri – Bringkang, Wringinanom – Driyorejo – Surabaya).
- e. Tersedianya Air Bersih PDAM.
- f. Tersedianya Energi Listrik dan gas.
- g. Tersedianya 1 Pelabuhan Umum dan 7 Pelabuhan khusus.

Ketersediaan infrastruktur tersebut, didukung dengan rencana pengembangan infrastruktur yang ada di Kabupaten Gresik, antara lain:

- a. Jalan Tol Surabaya- Mojokerto.
- b. Jalan Tol Gresik – Tuban.
- c. Jalan Lingkar Barat Surabaya.
- d. Pengembangan Air Bersih Untuk Kecamatan Kota dari sumber air Umbulan, untuk Wilayah Gresik Utara kebutuhan air baku/bersih dari Bendung Gerak Sembayat.
- e. Pengembangan penyediaan gas untuk wilayah perkotaan, Gresik Utara dan Gresik Selatan.
- f. Pengembangan kawasan Agropolitan dan Minapolitan.
- g. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Pelabuhan Kali Mireng.
- h. Jalan Lingkar dan Lapangan Terbang Perintis Pulau Bawean.

- i. *Environmental Recycling Park* (ERP) dan Penambahan lahan TPA Ngipik.
- j. Pengembangan Kawasan Perumahan Terpadu di Gresik Selatan.
- k. Penataan Kawasan Pesisir Terpadu.
- l. Kawasan Permukiman Terpadu Berwawasan Lingkungan di Cerme.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik tahun 2010 – 2030 penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan kabupaten yang berbasis industri, budaya, perikanan dan pertanian, yang ramah investasi dan berwawasan lingkungan.

Selain daya saing di bidang infrastruktur, Kabupaten Gresik juga memiliki keunggulan daya saing di bidang sosial budaya di Kabupaten Gresik, antara lain :

1. Di Kabupaten Gresik wajar dikdas 9 tahun sudah terwujud, sehingga ke depan akan ditingkatkan menjadi wajar pendidikan 12 tahun yang didukung pagu anggaran pendidikan yang sudah melampaui target nasional.
2. Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Gresik relatif tinggi dibandingkan daerah lain di wilayah Provinsi Jawa Timur.
3. Pelestarian dan pengembangan wisata religi, wisata kota lama/bangunan kuno, wisata alam, khususnya di Pulau Bawean.
4. Tersedianya RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik yang termasuk Rumah Sakit Tipe B dengan seluruh instalasinya berstandar ISO, yang menjadi rujukan pasien di wilayah Pantura, ditunjang dengan 5 Rumah Sakit Swasta, 32 Puskesmas dan 74 Puskesmas Pembantu.

Sedangkan daya saing dalam bidang perekonomian, keuangan, perijinan dan investasi meliputi :

1. PDRB, pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi tinggi.
2. Tersedianya komoditas unggulan, antara lain : sarung, kopyah, busana muslim, makanan khas, dsb.
3. Pendapatan Asli Daerah yang cukup tinggi.
4. Pelayanan perijinan investasi melalui sistem satu atap.
5. Pelayanan di bidang perijinan yang berkualitas dan profesional dengan standar ISO.

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD 2013 DAN RPJMD 2011-2015

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam RPJMD disusun Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Gresik yang kemudian dijabarkan dalam Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.

Dalam setiap Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan telah disusun indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Target kinerja dalam indikator RPJM tersebut kemudian diimplementasikan melalui perencanaan pembangunan tahunan secara keberlanjutan hingga tercapai target kinerja pada akhir tahun periode RPJMD. Walaupun dalam RPJM telah terdapat target kinerja mulai tujuan hingga kegiatan, namun dalam implementasinya target kinerja tersebut disesuaikan dengan kondisi aktual dalam setiap tahun perencanaan sehingga tidak mutlak mengadopsinya.

Adapun berdasarkan evaluasi capaian indikator tujuan RPJMD pada RKPD 2013 dapat diinformasikan sebagai berikut:

Tujuan 1, *Meningkatnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun, saling menghormati dan demokratis,* dengan indikator kinerja:

No	Indikator Kinerja	Satuan	2013		2014
			Target	Realisasi	Target
1	Angka kriminalitas	Kejadian	300		
2	Kejadian gangguan tramtib	kejadian	145		

Tujuan 2, *Terwujudnya pelayanan publik yang adil dan merata,* dengan indikator kinerja:

No	Indikator Kinerja	Satuan	2013		2014
			Target	Realisasi	Target
1	Persentase unit pelayanan yang melakukan survey IKM	%	60%		
2	Persentase SKPD yang memiliki Standar Pelayanan Publik (SPP)	%	70%		
3	Persentase SKPD yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	50%		

Tujuan 3, *Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat,* dengan indikator kinerja:

No	Indikator Kinerja	Satuan	2013		2014
			Target	Realisasi	Target
1	Pertumbuhan ekonomi	%	7,50		
2	Pendapatan per kapita (ADHB)	Rp	41.849.271,77		
3	Angka pengangguran	%	5,00		

Tujuan 4, Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar dengan indikator kinerja:

No	Indikator Kinerja	Satuan	2013		2014
			Target	Realisasi	Target
1	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	75.97		

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD 2015 Kabupaten Gresik merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Gresik yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan tahun 2012. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisisnya sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat *mandatory*.

Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh beberapa permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan
- b. Peningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan.
- c. Perluasan Lapangan Kerja.
- d. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Daerah Tertinggal serta Peningkatan Peran Perempuan dan Pengarusutamaan Gender.
- e. Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis
- f. Pemerataan dan Pertumbuhan perekonomian melalui: Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peningkatan Investasi dan Daya Saing Industri
- g. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Penyediaan Energi dan Kelestarian Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Penanggulangan Bencana serta Tata Ruang,

- h. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik
- i. Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Pariwisata, melalui Kreativitas dan Inovasi Teknologi serta Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga
- j. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, melalui penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia serta peningkatan kesalehan sosial.

2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah Penentuan Rencana Kegiatan mengacu pada 3 (tiga) hal, yaitu prioritas permasalahan yang belum terselesaikan dari tahun RKPD 2012, sejalan dengan isu strategis RPJMD 2011-2015, tidak bertentangan dengan isu strategis RKP Propinsi dan RKP Tahun 2014. Kemudian dari ketiga acuan diatas disusun menjadi prioritas pembangunan RKPD tahun 2014.

Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di berbagai sektor selama beberapa tahun terakhir telah memberikan hasil dan manfaar bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Gresik. Namun demikian, permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan menyebabkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat secara luas belum terealisasi sesuai dengan harapan yang diinginkan. Pembangunan yang dilaksanakan belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kelembagaan publik, termasuk alokasi sumber daya yang efisien. Manfaat pembangunan yang diharapkan belum merata dan kerawanan sosial masih sering terjadi, sehingga kehidupan masyarakat belum sepenuhnya membaik. Keadaan ini timbul sebagai akibat dari berbagai permaslaahan yang terjadi baik masa lalu maupun sekarang yang belum teratasi secara maksimal, seperti dijelaskan secara rinci sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.29 Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Program Pembangunan Daerah	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
I.	Meningkatnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun, saling menghormati dan demokratis		
1.	Meningkatnya aktivitas keagamaan	Pemahaman, penghayatan dan pengamalan kehidupan	Faktor keberhasilan dapat diwujudkan

No.	Program Pembangunan Daerah	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
		beragama di Kabupaten Gresik masih belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari	dengan adanya sarana ibadah yang semakin meningkat Meningkatnya Jumlah hari besar yang dirayakan
2.	Meningkatnya suasana yang sejuk, santun dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Perlunya menumbuhkan kesejahteraan batin dan ketentraman masyarakat untuk mendorong proses pembangunan yang lebih baik	Jumlah parpol yang dibina; Jumlah LSM, Ormas dan OKP yang dibina; Konflik yang dapat diselesaikan.
3.	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda	Masyarakat kurang memahami terhadap aturan dan produk hukum pemerintah daerah	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dalam rangka penegakan PERDA di Kab. Gresik; Demo / protes terhadap PERDA/Perbup; Keberadaan PERDA tentang Penyelenggaraan Trantibum; Keberadaan PERDA tentang PSK dan Miras; Rasio Satpol PP terhadap jumlah penduduk.
4.	Meningkatnya perlindungan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Perempuan seharusnya bukan hanya sebagai obyek pembangunan tetapi dapat lebih aktif menjadi subyek pembangunan. Perempuan harus dipacu kemampuannya agar terwujud kesetaraan gender di setiap bidang kehidupan dengan tetap menjaga martabat dan kehormatannya. Perlindungan lainnya dilakukan terhadap permasalahan tenaga kerja perempuan dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kemungkinan adanya kasus perdagangan (<i>human trafficking</i>) terhadap perempuan dan anak.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan P2T-P2A; Cakupan anak korban kekerasan yang tuntas mendapatkan penanganan pengaduan; Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum; Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
			mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas yang mampu terlaksana KtP/A dan PPT/PKT di

No.	Program Pembangunan Daerah	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
			Rumah Sakit; Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan; Cakupan lembaga perempuan dan anak yang terfasilitasi. persentase Perempuan dalam pemerintahan Angka melek huruf perempuan
5	Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah	Punahnya kekayaan seni dan budaya daerah harus ada upaya untuk melestarikan keberadaannya melalui pelaksanaan even budaya dan pemeliharaan cagar budaya.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya; Sarana penyelenggaraan seni dan budaya; Peninggalan / Cagar Budaya (Situs) yang dilestarikan.
II. Terwujudnya pelayanan publik yang adil dan merata			
1.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan	Masih kurangnya aktivitas kelembagaan masyarakat untuk menjadikan masyarakat yang mandiri	PKK aktif; Posyandu aktif Persentase keluarga miskin
2.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Masih tingginya PMKS yang memerlukan penanganan	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi; Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; Jumlah PMKS; Bantuan santunan Kematian; Penyaluran Raskin.
3.	Meningkatnya sarana dasar pemukiman	Masih tingginya kondisi lingkungan pemukiman masyarakat yang belum layak	Rumah tangga pengguna air bersih; Lingkungan pemukiman kumuh; Rumah layak huni
4.	Terjaminnya kualitas produk hukum dan kepastian hukum	Kualitas dan kuantitas produk hukum serta efektifitas implementasi masih belum sesuai harapan masyarakat	Perda yang ditetapkan; Jumlah Perda yang dibatalkan; Kasus hukum yang diselesaikan; Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti; Peraturan Bupati yang ditindak lanjuti.
5.	Meningkatnya penyelenggaraan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah	Pengawasan masih dirasakan kurang sehingga akan mempengaruhi	Prosentase rekomendasi atas temuan hasil
		Akuntabilitas kinerja dan pembangunan daerah	pengawasan yang ditindak lanjuti;

No.	Program Pembangunan Daerah	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
			Prosentase LAKIP SKPD yang dievaluasi; Prosentase informasi masyarakat yang ditindak lanjuti.
6.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah	Sistem pemerintahan yang baik belum sepenuhnya terwujud	Konsultasi Pemerintahan Kabupaten dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah; Hasil Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKK LPPD).
7.	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan aset daerah	Pengelolaan keuangan yang tertib dan akurasi belum sepenuhnya terwujud dan aset-aset daerah yang belum efektif penggunaannya	Opini laporan keuangan; Laporan keuangan tersusun tepat waktu; APBD ditetapkan tepat waktu; Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005; Peningkatan PAD; Keberadaan kemandirian daerah; Perusahaan Daerah dalam kondisi sehat; Asset (Bangunan yang dipelihara dan dimanfaatkan).
8.	Meningkatnya peran legislatif dalam tugas pemerintahan	Agar legislatif sebagai mitra Pemerintah Kabupaten dapat berfungsi secara maksimal khususnya dalam hal penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten yang berfihak kepada kepentingan publik serta dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.	Voting yang dilakukan dalam sidang paripurna; Keterlibatan masyarakat dalam pembahasan raperda; Perda inisiatif DPRD.
9.	Meningkatnya pengelolaan aparatur yang profesional	Aparatur yang profesional harus diwujudkan secara terus-menerus agar kinerjanya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat	Rasio pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai jenjangnya; Rasio jabatan yang terisi; Rasio Pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal; Rasio Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan. Kesesuaian SOTK SKPD dengan Pedoman / Peraturan tentang SOTK; Persentase SKPD yang telah dilakukan analisa jabatan.

No.	Program Pembangunan Daerah	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
10.	Meningkatnya kerjasama daerah	Masih kurangnya kerjasama daerah yang diciptakan, guna percepatan pengembangan sumber daya yang ada di Kabupaten Gresik	Jumlah MOU Kerjasama dengan Daerah/lembaga Lain dan Pihak Ketiga.
11.	Meningkatnya akuntabilitas pengadaan barang dan jasa	Agar Sistem Pengadaan barang dan jasa dapat lebih akuntabel dan transparan	Keberadaan unit pelayanan pengadaan; Keberadaan E-procurement; Petugas yang lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Layanan administrasi kependudukan yang dilakukan berupa pelayanan KTP, KK dan akte catatan sipil harus terus ditingkatkan kualitasnya, sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan juga semakin meningkat.	Kepemilikan KTP; Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran; Pengurusan KTP
13.	Meningkatnya sistem komunikasi informasi dan media massa	Komunikasi dan informasi sangat dibutuhkan dalam rangka mempererat hubungan antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat, sehingga dapat terjadi sinergi yang positif dalam pembangunan.	Keberadaaan Website Pemerintah Daerah; Pengunjung Website setiap tahun; Sistem informasi yang tersedia; Jumlah pemberitaan di media; Persuratan secara elektronik.
14.	Meningkatnya penanganan pertanahan	Pelayanan pertanahan di daerah perlu dikoordinasikan antara pemerintah kabupaten dengan instansi pemerintah pusat badan pertanahan, sehingga diharapkan permasalahan pertanahan yang ada dapat diselesaikan untuk kepastian hukum di masyarakat.	Penyelesaian Kasus Tanah Negara.
15.	Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW	Dalam implementasi RTRW harus selalu dipantau, dikendalikan dan dievaluasi khususnya dalam hal pemanfaatan suatu wilayah agar tidak terjadi konflik kepentingan dimasyarakat	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB; Keberadaan Perda RTRW; Perubahan pemanfaatan fungsi kawasan RTRW.
16.	Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan	adanya keterbatasan sumber daya daerah baik SDM maupun keuangan maka perencanaan daerah harus disusun secara efektif dengan berupaya	Ketersediaan RPJPD, RPJMD dan RKPD; Program RKPD yang diakomodasi dalam

No.	Program Pembangunan Daerah	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
		menyiapkan dokumen perencanaan yang baik agar pembangunan daerah yang dapat sustainable berkelanjutan dan memberi manfaat kepada masyarakat	APBD.
17.	Tersedianya data statistik daerah yang akurat dan tepat waktu	Perlunya data sebagai dasar dalam menentukan kebijakn pembangunan	Jenis –jenis data/ dokumen statistik yang disusun (Kabupaten dlm Angka, PDRB Kabupaten dan IPM).
18.	Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib rapi dan handal	Perlunya tertib arministrasi dalam mengelola arsip	Penerapan pengelolaan arsip secara baku.
19.	Terselenggaranya pelayanan ketrasmigrasian	Perlunya meningkatkan pelayanan ketrasmigrasian mengingat diperlukan kesiapan dan	Pembinaan calon transmigran
III. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat			
1.	Meningkatnya usaha perdagangan	Perlunya secara terus menerus menumbuh kembangkan perdagangan, pasar dan usaha lainnya agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat secara konsisten	Pertumbuhan Penerbitan SIUP, TDP dan TDG; Pertumbuhan nilai investasi perdagangan; Jumlah Pameran / Ekspo Per Tahun.
2.	Meningkatnya sektor industri	Pertumbuhan sektor industri masih dirasakan belum optimal sehingga perlu dilakukan langkah-langkah implementasi	Pertumbuhan Industri; Pertumbuhan Nilai Produksi.
3.	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM)	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan sektor yang paling banyak menyerap pelaku ekonomi di kabupaten, sehingga upaya untuk memberdayakan dan melindungi kesinambungan usaha mereka harus dilakukan	Koperasi aktif; Usaha Mikro dan Kecil; Koperasi yang mendapatkan penilaian baik
4.	Meningkatnya investasi di daerah	Iklim investasi masih perlu mendapat perhatian uatama mengingat kinerja belum maksimal	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN; Persentase Penyelesaian Permohonan : Ijin Lokasi, Ijin Pertambangan Daerah (SIPD), Ijin Gangguan (HO), Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Prinsip Ijin Usaha.
5.	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Perlunya secara terus-menerus melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap petani agar dapat	Produksi pertanian meliputi padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar;

No.	Program Pembangunan Daerah	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
		meningkatkan jumlah dan jenis produksi	Produksi sayuran meliputi bawang merah, sawi, kacang panjang, cabe, tomat, terong, ketimun, labu siam, kangkung dan bayam; Produksi buah meliputi jambu biji, jeruk, mangga, pepaya, pisang, belimbing, sawo dan sirsak.
6.	Meningkatnya produksi hasil perkebunan	Produksi perkebunan di Kabupaten Gresik cukup mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan potensi perkebunan.	produksi hasil perkebunan yang terdiri dari tembakau, tebu, kelapa, cengkeh, kopi, jambu mente, kapuk randu, kakao, kunyit dan siwalan.
7.	Meningkatnya produksi dan populasi peternakan	Kebutuhan akan penyediaan daging ternak terus meningkat	persediaan kebutuhan daging, susu dan telur serta populasi binatang ternak.
8.	Meningkatnya rehabilitasi dan konservasi lingkungan	pemanfaatan sumber daya alam agar terjaga kelestariannya maka diperlukan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan. Sehingga pengawasan pada lingkungan eksploitasi alam harus dilakukan secara ketat.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis; Produksi hasil hutan kayu jati dan non kayu jati.
9.	Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan	Agar dapat mengembangkan sektor perikanan perlu dilakukan peningkatan produksi perikanan budidaya dan perairan umum. Untuk itu diperlukan jumlah benih ikan yang cukup.	Jumlah produksi perikanan yang meliputi budi daya, penangkapan dan perairan umum; Produktivitas lahan tambak meliputi air payau dan tawar.
10.	Meningkatnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup	Terjadi penurunan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebagai akibat dampak dari berbagai kegiatan.	Luas Lahan Kritis; Rasio Luas Kawasan lindung; Persentase jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air; Persentase jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara; Luas RTH Perkotaan.
11.	Meningkatnya penanganan persampahan	Penanganan sampah masih sangat terbatas sehingga diperlukan upaya khusus agar persampahan dapat tertangani secara baik	Penanganan sampah; Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk; Pembangunan Pengolahan Sampah

No.	Program Pembangunan Daerah	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
			Terpadu (ERP).
12.	Meningkatnya pelayanan dan transportasi daerah yang aman, lancar dan terjangkau	Meningkatnya jumlah kendaraan menimbulkan berbagai permasalahan lalu lintas yang perlu mendapat perhatian mengingat kebutuhan layanan transportasi cukup tinggi	Persentase ketersediaan angkutan darat; Persentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas; Persentase angkutan umum darat dalam kondisi layak jalan; Ketersediaan angkutan laut (penyeberangan); Pembangunan Bandara Domestik di Pulau Bawean; Persentase Permasalahan Bidang Perhubungan yang Diselesaikan.
13.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Menyediakan lapangan kerja yang layak bagi semua warganya merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten. Sehingga melalui kebijakan publik yang terencana dan jelas harus mampu menurunkan angka pengangguran terbuka kabupaten, menciptakan lapangan kerja baik formal maupun informal yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.	Tingkat partisipasi angkatan kerja; Pencari kerja yang ditempatkan; Angka pengangguran penduduk usia 15-24 tahun.
14.	Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja	Agar dapat menjamin setiap pekerja memperoleh hak-haknya maka perlu dilakukan upaya pengawasan dan pembinaan terhadap pengusaha tentang perlindungan terhadap tenaga kerja, yang meliputi keselamatan kerja, kesehatan kerja, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja.	Kepatuhan terhadap Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Kepatuhan Terhadap Norma kerja; Kepatuhan Terhadap Norma Jaminan Sosial Tenaga kerja; Angka Kecelakaan Kerja; Angka Penuntasan/ penyelesaian perselisihan hubungan industrial; Pemberlakuan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Sama; Kepatuhan atas ketentuan mengenai Kepemilikan Lembaga Kerjasama Bipartit.
15.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Untuk meningkatkan pariwisata daerah salah satu ukurannya adalah jumlah kunjungan wisatawan. Untuk itu perlu dikembangkan obyek-	jumlah kunjungan wisata

No.	Program Pembangunan Daerah	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
		obyek pariwisata daerah yang dapat menarik kunjungan masyarakat. Disamping itu, agar kunjungan dapat meningkat perlu terjalin koordinasi dan kerjasama dengan pengusaha pariwisata baik di dalam maupun luar Kabupaten.	
16.	Meningkatnya sarana infrastuktur daerah	Pemenuhan infrastuktur jalan dan jembatan dimaksudkan untuk mendukung pengembangan ekonomi di daerah. Ketersediaan jalan dan jembatan yang baik akan mampu mendorong pelaku ekonomi untuk mengembangkan usahanya di Kabupaten Gresik. Oleh karena itu pemerintah kabupaten harus mendorong tersedianya jalan dan jembatan yang memadai terutama untuk daerah pengembangan ekonomi yang telah direncanakan.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik; Jembatan kabupaten dalam kondisi baik; Panjang Jalan Poros Desa Yang Terbangun.
17.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi	Pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian. Oleh karena itu upaya prioritas dalam pengelolaan air adalah ketersediaan air untuk pertanian.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik; Panjang saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik; Bendung Gerak Sembayat.
18.	Meningkatnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral daerah	Eksplorasi yang berlebihan tanpa mempertimbangkan kelestariannya akan menyebabkan potensi tersebut menjadi habis dan hilang. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan terhadap pertambangan yang ada di masyarakat.	Persentase ABT berijin yang membayar pajak.
IV.	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya		
1.	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia sekolah	Pemerataan kesempatan belajar dapat dicapai melalui peningkatan dan pemeliharaan gedung sekolah, peningkatan pelayanan pendidikan luar sekolah serta bantuan biaya pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dicapai melalui peningkatan kualitas guru, peningkatan sarana penunjang belajar	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara); Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B serta SMA/SMK/MA; Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI,

No.	Program Pembangunan Daerah	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
		seperti buku, laboratorium dan ruang praktik, peningkatan manajemen sekolah, peningkatan metodologi pembelajaran.	SMP/MTs serta SMA/SMK/MA; Angka Kelulusan (AL) SD/MI, SMP/MTs serta SMA/SMK/MA; Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs; Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA; Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV.
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diharapkan usia harapan hidup masyarakat juga meningkat. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan pelayanan	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4; Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan; Cakupan Pelayanan Nifas; Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani; Cakupan Pelayanan Anak Balita; Cakupan Kunjungan Bayi; Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI); Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC (BTA+); Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD; Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin; Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan; Cakupan Balita yang Mendapat Vitamin A; Persentase Rumah Sehat; Ketersediaan Obat Sesuai Kebutuhan; Pengadaan Obat Esensial; Pengadaan Obat Generik; Cakupan Rawat Jalan; Cakupan Rawat Inap; Cakupan Rumah Tangga Sehat;

No.	Program Pembangunan Daerah	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
			Posyandu Purnama; Pelayanan pasien jamkesmas dan jamkesda; Bed Occupancy Rate; Average Length Of Stay; Turn Over Internal; Bed Turn Over.
3.	Meningkatnya pelayanan keluarga berencana	Sebagai bagian dari program pengendalian jumlah penduduk, maka urusan ini memegang peranan penting dalam menekan pertumbuhan penduduk. Dengan didasari oleh kesadaran yang tinggi dari masyarakat tentang pentingnya pengendalian pertumbuhan penduduk maka pelayanan alat KB kepada pasangan usia subur harus ditingkatkan	Prevalensi peserta KB Aktif;Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun;Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmeet need);Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB);Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Di Setiap Desa/Kelurahan.
4.	Meningkatnya minat baca masyarakat	meningkatkan kecerdasan masyarakat dilakukan upaya meningkatkan minat baca masyarakat. Diantaranya dengan cara meningkatkan aksesibilitas masyarakat kepada perpustakaan umum serta melakukan penambahan buku bacaan dan tempat baca yang lebih banyak di masyarakat.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah; Pengunjung perpustakaan; Jumlah anggota perpustakaan.
5.	Meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat	dijadikannya urusan pertanian menjadi prioritas pembangunan maka diharapkan surplus stok pangan daerah dapat semakin meningkat.	Regulasi ketahanan pangan; Ketersediaan pangan; Rata-rata konsumsi bahan pangan utama.
6.	Meningkatnya prestasi olah raga daerah	prestasi pemuda di daerah perlu dilakukan pembinaan dan ajang prestasi pemuda. Sedangkan untuk meningkatkan prestasi olahraga dilakukan melalui kerja sama dengan KONI kabupaten dan organisasi persatuan olahraga yang ada di daerah. Dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan diharapkan akan muncul pemuda dan olahragawan yang berprestasi di daerah.	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif; Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta); Lapangan Olah Raga; Persentase cabang olah raga yang aktif. Jumlah atlet berprestasi \Jumlah Cabang olahraga yang berprestasi

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan

Berdasarkan pada Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 – 2015, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2012 yang belum terselesaikan, Isu Strategis Pembangunan Nasional 2014, Isu Strategis RKP Provinsi tahun 2014 serta pertimbangan lainnya terkait permasalahan strategis yang aktual dan faktual, maka dirumuskan Isu Strategis yang akan menjadi bahan kebijakan dalam perencanaan kegiatan Tahun 2014 sebagai berikut :

**Tabel 2.30 Hubungan antara Isu Strategis dengan Prioritas RPJMD
Tahun 2011-2015**

No.	Prioritas	Isu Strategis
1.	Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan	a. Menumbuhkan dan berkembangnya kegiatan-kegiatan keagamaan yang bersifat massal untuk meningkatkan hubungan manusia dengan sang Pencipta, seperti pengajian, Istighosa, serta do'a bersama lintas agama. b. Tumbuh dan berkembangnya kajian-kajian Intensif keagamaan untuk memperkuat keimanan dan ketaqwaan, seperti kajian kitab kuning dan forum lintas agama. c. Penguatan institusi (<i>institutional building</i>) keagamaan yang mandiri dan mengakar di masyarakat, seperti pondok pesantren dan majlis taklim. d. Meningkatnya bantuan pembangunan tempat ibadah dan fasilitas keagamaan serta bantuan dana bagi para pengelola tempat ibadah dan lembaga keagamaan secara merata dan berkesinambungan. e. Terbangunnya indikator Gresik sebagai Kota Santri dan Kota Wali dalam bentuk <i>Islamic Center</i> dan memberdayakan Jam'iatul Quro' wal Huffad. f. Terwujudnya kerukunan intern umat beragama serta antar umat beragama melalui konsep tri kerukunan hidup beragama.
2.	Pendidikan	a. Perlu didirikan Taman Kanak-kanak atau sejenisnya yang lebih banyak, sehingga akan meningkatkan mutu tingkat SD. b. Angka mengulang dan putus sekolah di tingkat SD perlu diturunkan dengan cara meningkatkan mutu Guru dan memberikan beasiswa, atau dengan bimbingan penyuluhan kepada setiap siswa oleh sekolah yang bersangkutan. c. Perlu ditingkatkan kemampuan Guru dalam mengajar, sehingga diharapkan semua Guru dari jenjang SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK, baik negeri maupun swasta mempunyai kelayakan mengajar yaitu setingkat S1. Untuk itu pemerintah harus menyelenggarakan penyetaraan pendidikan bagi guru yang belum mempunyai sertifikasi setara S1. d. Perlu dilakukan rehabilitasi bagi ruang kelas yang rusak berat, terutama pada tingkat SD. e. Fasilitas sekolah, baik perpustakaan maupun lapangan olahraga serta UKS merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh sekolah, sehingga perlu dibangun fasilitas tersebut di semua tingkat. f. Fasilitas ditingkat SMA dan MA perlu dibangun laboratorium, ruang serbaguna, ruang BP dan SMK ditambah ruang praktek. g. Pemerintah Kabupaten perlu meningkatkan partisipasinya dalam pembiayaan sekolah dari tingkat SD sampai SMA sehingga mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat dan juga mengurangi ketergantungan dari orangtua, dan tercipta pendidikan yang murah, serta pada akhirnya semua anak usia sekolah tidak ada yang tidak sekolah.

No.	Prioritas	Isu Strategis
		h. Kurikulum muatan lokal hendaknya disesuaikan dengan kondisi daerah sehingga apa yang diajarkan dalam mata pelajaran muatan lokal dapat diaplikasikan di daerah, khususnya di Kabupaten Gresik. i. Perlu dilakukan penjurusan di SMA yang menggunakan prosedur penjurusan gabungan antara prestasi dengan bakat / minat, sehingga akan dihasilkan lulusan yang bermutu. j. Perlu dikaji ulang kelompok SMK supaya disesuaikan dengan dunia usaha di Gresik, sehingga lulusannya dapat tertampung semua, yang pada akhirnya bisa mengurangi migrasi dan angka pengangguran. k. Perlu didirikan SMK secara besar-besaran untuk menciptakan tenaga kerja yang siap / terampil, baik untuk kebutuhan tenaga kerja lokal maupun mancanegara. l. Guna mengurangi pemborosan biaya yang sangat besar, maka pada setiap jenjang sekolah agar diupayakan untuk mengurangi siswa yang putus sekolah dan mengulang untuk semua jenis sekolah serta penyusunan standar biaya pendidikan pada semua jenjang sekolah. Selain itu, perlu dilakukan Revitalisasi Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah, antara lain : b. Perbaiki ruang belajar yang rusak ringan dan berat agar dapat digunakan secara layak dan dapat menciptakan lingkungan belajar-mengajar yang nyaman. c. Pengadaan sarana dan prasarana kelengkapan dan penunjang belajar-mengajar. d. Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik, baik negeri maupun swasta (insentif yang sudah ada sekarang ini akan ditingkatkan). e. Biaya pendidikan gratis mulai TK sampai SLTA/MA untuk pendidikan yang berstandar nasional dan beasiswa bagi anak didik berprestasi sampai dengan lulus S-1. f. Pemerataan dan peningkatan bantuan ponpes dan lembaga pendidikan formal, baik negeri maupun swasta secara adil dan merata di seluruh kecamatan. g. Meningkatkan kualitas sekolah, khususnya Sekolah Menengah Tingkat Lanjutan Atas secara bertahap hingga Tahun 2015, semua Kecamatan sudah mempunyai SMU rintisan yang bertaraf Internasional. h. Melanjutkan dan meningkatkan sertifikasi pendidik khususnya guru SMA untuk mendukung kualitas pendidikan ke taraf Internasional dan mampu menciptakan anak didik yang terampil dan siap masuk dalam bursa tenaga kerja maupun dapat menciptakan tenaga kerja mandiri. i. Mendukung dan mensukseskan sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah umum untuk mengikuti lomba-lomba ilmiah tingkat nasional dan internasional dalam bentuk pemberian insentif yang sesuai, baik kepada pembina sekolah maupun anak didik. j. Mendirikan dan mendorong swasta untuk mendirikan sekolah-sekolah kejuruan yang dapat mendidik siswa-siswa terlatih untuk siap berkompetisi pada bursa tenaga kerja, paling tidak dapat menolong diri sendiri untuk bekerja secara mandiri. k. Meningkatkan anggaran pendidikan dari APBD kabupaten Gresik untuk dapat membantu anak didik, terutama yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah dan atau berprestasi serta mendukung sekolah-sekolah yang berprestasi, termasuk penyediaan peralatan-peralatan yang dibutuhkan, baik untuk kepentingan yang mendukung kemajuan, pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk meningkatkan keterampilan

No.	Prioritas	Isu Strategis
		anak didik.
3.	Reformasi Birokrasi dan SDM Aparatur	a. Revitalisasi sistim pengawasan yang dapat mencegah tumbuh dan berkembangnya korupsi, kolusi dan nepotisme di kalangan aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan. b. Standarisasi semua jenis pelayanan guna terciptanya pelayanan yang murah, mudah, terjangkau dan transparan serta tidak diskriminatif. c. Memupuk dan meningkatkan budaya kerja di kalangan pegawai melalui pelatihan secara teratur guna menciptakan pegawai yang profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga memahami posisinya sebagai pelayan masyarakat, bukan dilayani oleh masyarakat. d. Menetapkan jalur karir secara teratur dan teratur, sehingga merangsang pegawai untuk berkompetisi secara jujur dan adil untuk mencapai jenjang karir yang lebih tinggi. e. Menetapkan keharusan uji kelayakan pada setiap pejabat yang akan ditetapkan sebagai pejabat eselon III ke atas dan eselon IV, yang mempunyai tugas dan fungsi strategis di bidang keuangan dan pelayanan. f. Penempatan pegawai yang memenuhi syarat kompetensi, profesionalisme dan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan oleh tugas dan fungsinya. g. Peningkatan dan pengembangan <i>skill</i>, produktifitas, kualitas dan inovasi serta disiplin kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	a. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di setiap Desa, sesuai dengan potensi dan kekhasan masing-masing Desa; b. Memperkuat manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMD), sehingga mampu mengelola Usaha Milik Desa secara mandiri berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat. c. Membangun sentra-sentra pasar produksi dan memberdayakan pasar desa sebagai kekuatan ekonomi penunjang dalam menggairahkan kegiatan ekonomi di desa. Peningkatan Ketahanan Pangan, melalui upaya : a. Mendorong masyarakat agar dapat memanfaatkan pekarangan yang dimiliki untuk pengembangan pangan, khususnya sayur-sayuran pada wilayah yang memenuhi syarat. b. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produksi, baik untuk hasil pertanian, hortikultura, maupun perkebunan. Pemberdayaan masyarakat, melalui upaya : a. Peningkatan partisipasi lembaga keswadayaan masyarakat dalam membangun desa / kelurahan, salah satunya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dan Pedesaan, agar mampu mengurangi jumlah rumah tangga miskin secara bertahap. b. Pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat dalam pemanfaatan dan penerapan Teknologi Tepat Guna (POKMAS-TTG). c. Pengadaan lomba desa / kelurahan untuk meningkatkan gairah masyarakat dalam membangun desa / kelurahannya. d. Peningkatan peran perempuan, melalui pembinaan PKK dan organisasi wanita lainnya, agar 10 program PKK dapat dilaksanakan dan diwujudkan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. e. Melaksanakan dan melanjutkan pembinaan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera agar mampu menggugah kesadaran dan peranserta perempuan dalam

No.	Prioritas	Isu Strategis
		pembangunan. f. Revitalisasi fungsi dan peran POSYANDU sebagai garis terdepan dalam menjaga dan memberikan kesadaran tentang pentingnya budaya hidup sehat bagi masyarakat dan lingkungannya. g. Memperkuat Pemerintahan Desa sebagai ujung tombak demokrasi, pembangunan dan pelayanan masyarakat, melalui upaya : a. Meningkatkan Alokasi Dana Desa dan Alokasi Dana Kelurahan dengan reorientasi penggunaannya. b. Memperbaiki pola penghasilan Kepala Desa / Lurah dan perangkatnya. c. Peningkatan kemampuan aparatur desa / kelurahan dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan, demokrasi dan pelayanan masyarakat.
5.	Pertanian, Kelautan dan Perikanan	a. Meningkatkan kualitas SDM petani, penyuluh dan kelompok-kelompok tani yang ada melalui pelatihan-pelatihan secara intensif dan berkesinambungan. a. Mengintensifkan dan mengoptimalkan pengetahuan dan aktivitas tenaga penyuluh pertanian melalui peningkatan kualitas tenaga penyuluh, penyediaan lahan yang akan digunakan untuk percobaan, pembibitan dan pelatihan petani. b. Pembinaan terhadap pelaku usaha agrobisnis, guna meningkatkan pendapatan petani kecil dan menengah. c. Memperbaiki sarana dan prasarana pertanian, guna meningkatkan produksi pertanian. d. Menata pesisir pantai, baik yang ada di wilayah daratan maupun di pulau Bawean untuk mempertahankan ekosistem yang ada dan menjadikan tempat wisata yang layak jual. e. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan perikanan melalui pembentukan UPT Pengembangan Budidaya dan Penangkapan, guna meningkatkan keterampilan nelayan dan masyarakat pesisir. f. Pengadaan laboratorium dan sarana pembibitan serta percontohan budidaya yang berkaitan dengan ikan air tawar maupun ikan air laut untuk membantu masyarakat, guna meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil yang diperoleh yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. g. Meningkatkan ekonomi nelayan melalui pembangunan dan rehabilitasi tempat pelelangan ikan dan kedai pesisir guna mengoptimalkan pemasaran produksi perikanan
5.	Kemiskinan	a. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin. b. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin. c. Pembinaan pelayanan serta perlindungan sosial dan hukum kepada masyarakat miskin dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial.
6.	Kesehatan	a. Pada akhir tahun 2015 semua puskesmas di Kecamatan diharapkan sudah memperoleh sertifikat ISO 2000 untuk semua bidang pelayanan. a. Penerapan sistem insentif dan disinsentif secara terukur dan layak untuk tenaga medis dan pendukungnya agar tetap mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan standar yang ada. b. Memberikan insentif khusus kepada tenaga dokter, termasuk dokter spesialis yang mau bertugas di Pulau Bawean. c. Memperbaiki indikator yang dijadikan kriteria

No.	Prioritas	Isu Strategis
		JAMKESMASDA, agar dana yang dikeluarkan APBD bisa tepat sasaran dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. d. Memberikan pelayanan gratis hingga tingkat rawat inap di puskesmas untuk pasien yang masuk kriteria tidak mampu sesuai indikator masyarakat miskin yang ditetapkan. e. Meningkatkan anggaran operasional, khususnya di puskesmas dan pustu agar dapat mendukung pelaksanaan pelayanan gratis, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, antara lain : f. Membangun puskesmas dengan fasilitas maksimal di semua eks wilayah kerja pembantu bupati, yaitu Gresik, Driyorejo, Sedayu, Cerme dan Sangkapura. g. Pembangunan dan pemugaran puskesmas dan pustu, serta membentuk poskesdes / poskeskel secara merata. h. Pengadaan peralatan yang dapat mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas.
8.	Air Bersih	4. Menormalisasi semua waduk / embung-embung yang ada di Kabupaten Gresik sebagai penunjang sumber air baku yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik untuk mendukung pertanian maupun kebutuhan air minum masyarakat. 5. Melarang pengambilan air dari sumur dalam yang berlebihan untuk kebutuhan industri dan komersial, guna mencegah intrusi air laut, karena akan merusak lingkungan dan menghambat penghijauan serta memperkecil sumber air sumur dangkal masyarakat. 6. Membangun sarana dan prasarana air minum, baik melalui jaringan perpipaan terawasi yang dilaksanakan oleh PDAM maupun melalui pengelolaan swadaya dan sharing dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Pembangunan dan Penyediaan air bersih Umbulan, sehingga diharapkan sampai dengan akhir tahun 2015 wilayah perkotaan sudah terlayani 90 % masyarakatnya dan wilayah pedesaan 60% dari jumlah warganya, serta memenuhi semua kebutuhan industri agar dapat memberi bantuan subsidi tarif silang kepada pelanggan rumah tangga, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik 7. Memperkuat PDAM Kabupaten Gresik, agar menjadi Badan Usaha yang sehat dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan dan masyarakat melalui pembenahan manajemen dan sistem operasionalnya. 8. Membentuk zona-zona air siap minum secara bertahap.
9.	Ketenagakerjaan dan Kependudukan	d. Membangun gedung pusat pelatihan yang representatif dan dikelola secara profesional guna menciptakan tenaga kerja yang terampil dan terlatih serta tersertifikasi agar mampu berkompetisi dalam bursa tenaga kerja, baik di wilayah Kabupaten Gresik maupun di luar Kabupaten Gresik serta dapat menciptakan lapangan kerja sendiri, yang bidang pelatihannya disesuaikan dengan kebutuhan pasar. e. Memberikan kesempatan pelatihan secara gratis kepada masyarakat dalam usia produktif dan sudah putus sekolah karena tidak mampu melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi untuk memperoleh keterampilan pada bidang-bidang kerja khusus hingga memperoleh sertifikat di bidang tertentu dan kualifikasi tertentu. f. Mewajibkan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa untuk dilaksanakan secara swakelola dengan model padat karya. g. Menciptakan kondisi investasi yang sehat untuk menarik

No.	Prioritas	Isu Strategis
		minat investor dalam menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Gresik, terutama yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak. h. Optimalisasi peran dan fungsi strategis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam perencanaan pembangunan. i. Peningkatan kesadaran penduduk dalam upaya pemerataan penduduk (mobilitas)
10.	Infrastruktur dan Pengembangan	a. Revitalisasi pembangunan dan peningkatan pemeliharaan jalan poros desa dengan memprioritaskan hubungan antar desa yang mempunyai sentra-sentra produksi sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dapat dioptimalkan; b. Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Kabupaten akan di lanjutkan dan ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya sehingga dapat meningkatkan hubungan simpul antar moda dengan prioritas yang berpotensi memberikan nilai tambah ekonomi pedesaan dan mendukung keberadaan jalan poros desa, jalan kabupaten serta jalan propinsi dan nasional; c. Mendorong pemerintah pusat agar mempercepat proses pembangunan Bendung Gerak Sembayat Baru (<i>new Sembayat barrage</i>), dan Waduk Bunder sebagai sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih / air minum dan kebutuhan pengairan pertanian di Kabupaten Gresik bisa segera diwujudkan, karena menurut Peraturan yang ada, pengadaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum dan pengairan pertanian merupakan tugas dan kewenangan Pemerintah Pusat; d. Melanjutkan pembangunan Tanggul Bengawan Solo di Kecamatan Bungah sampai daerah muara di Kecamatan Ujung Pangkah; e. Pembuatan Masterplan Banjir Perkotaan, mengoptimalkan fungsi daerah resapan dengan memperbanyak Ruang Terbuka Hijau (RTH); f. Percepatan pembangunan Bendung Gerak Sembayat, WTP dan Infrastruktur penunjang penyediaan kebutuhan air baku; g. Pembangunan infrastruktur penunjang kawasan ekonomi khusus atau kawasan industri Kec. Manyar berupa pelabuhan industri dan infrastruktur lainnya; h. Pembangunan Jalan Lingkar Barat yang menghubungkan wilayah Gresik Selatan, Barat ke kota; i. Pembangunan jalan poros desa, jalan propinsi (Bunder – Legundi) dan jalan Tol SUMO guna membuka pembangunan perumahan di daerah Kecamatan Kedamean dan Wringinanom; j. Pemanfaatan lahan bekas rencana pengolahan limbah B3 di Kecamatan Cerme menjadi kawasan perumahan terpadu berwawasan lingkungan; k. Pembangunan Enviromental Recycling Park (ERP) guna pengolahan limbah khususnya di Kabupaten Gresik dan kawasan Indonesia bagian Timur; l. Penanganan secara menyeluruh mulai dari hulu sampai hilir Kali Lamong berupa, tanggul, pengerukan badan sungai, reboisasi daerah tangkapan/hulu dan penataan industry di daerah hilir; m. Percepatan pembangunan perumahan daerah perbatasan Gresik – Surabaya di Kecamatan Menganti dan Driyorejo; n. Pemanfaatan lahan paska tambang di wilayah Kecamatan Wringinanom, Menganti, Kedamean, dan Driyorejo; o. Mendukung pembangunan jalan lingkar Barat Surabaya dan Water Bus Sidoarjo - Gresik – Surabaya; p. Pembangunan sarana dan prasarana listrik di Pulau

No.	Prioritas	Isu Strategis
		Bawean; q. Mengusahakan pengadaan transportasi laut yang layak ke Pulau Bawean dan melanjutkan serta merampungkan lapangan terbang perintis di Kecamatan Tambak; r. Optimalisasi perbaikan jalan lingkar Bawean dan pembangunan jalan baru (tembus) yang dapat menghubungkan bagian barat dan bagian timur Pulau Bawean; s. Pengembangan pengepakan perikanan laut dalam keadaan hidup untuk konsumsi regional P. Bawean.
.		Pengembangan wilayah di Kabupaten Gresik agar bisa menjadi lebih baik, yaitu : u. Menjadikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Kawasan sebagai pedoman dasar penggunaan tata guna lahan dalam pembangunan dan pengembangan wilayah di Kabupaten Gresik. v. Pengembangan Kawasan Industri Terpadu di wilayah Gresik bagian Utara. w. Pengembangan Kawasan Industri Terpadu di wilayah Gresik bagian Selatan. x. Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan.
11.	Lingkungan Hidup	a. Meningkatkan kualitas lingkungan tanah, laut dan udara. b. Menurunnya konflik kepentingan antar pelaku usaha dan masyarakat. c. Meningkatkan pengelolaan sampah secara terpadu. d. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
12.	Pariwisata	a. Membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana wisata religius agar memberikan kenyamanan dan kekhuyu'an pengunjung wisata religi. b. Mensinergikan antar wisata religi untuk membangun kekuatan daya tarik dan minat wisatawan religi untuk memperpanjang waktu berkunjung ke tempat-tempat wisata di Kabupaten Gresik. c. Membuat <i>master plan</i> pengembangan wisata Pulau Bawean menuju ikon wisata Jawa Timur sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur. d. Membangun sarana dan Prasarana Wisata pantai Dalem sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung dan dapat dijadikan sebagai salah satu tujuan wisata alam di Kabupaten Gresik.
13.	Energi dan Sumberdaya Mineral	a. Membangun komitmen yang saling menguntungkan antara pemerintah, pemerintah daerah dan pengelola / operator, agar hasilnya selain dapat memberikan kontribusi yang memadai untuk membangun Kabupaten Gresik, juga tetap menjaga kelestarian lingkungan yang ada dan masyarakat sekitarnya. b. Optimalisasi peran dan fungsi BUMD pengelola energi dan sumber daya mineral (PT. Gresik Migas). c. Mengendalikan dan mengawasi secara ketat pertambangan rakyat / skala kecil maupun besar agar tidak merusak lingkungan dengan mewajibkan kepada semua penambang rakyat dan pertambangan strategis lainnya agar melaksanakan dan mentaati ketentuan dan petunjuk yang ada.
14.	Kesenian, dan Olah Raga	Menginventarisasikan budaya asli gresik dan menetapkan serta mempublikasikan ragam dan lokasi budaya Kabupaten Gresik, sehingga diharapkan akan menjadi ciri dan corak yang membanggakan masyarakat gresik. b. Melaksanakan kompetisi secara teratur dan berkesinambungan untuk mendorong

No.	Prioritas	Isu Strategis
		tumbuhnya jiwa cipta, rasa dan karsa seni warga masyarakat kabupaten Gresik dalam rangka mengembangkan dan mempertahankan bakat seni yang dimiliki. c. Membangun gedung kesenian di tingkat Kabupaten yang representatif. d. Mendorong dan membantu terbentuknya klub-klub olah raga dan terbangunnya lapangan sepak bola dan bola voli di setiap Kecamatan, guna mendukung lancarnya kompetisi seperti Gala Desa yang akan dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan, seperti sepak bola dan bola voli yang diharapkan dapat membanggakan dan menggairahkan masyarakat Gresik untuk berolah raga. e. Membangun stadion olahraga tingkat kabupaten yang representatif. f. Menyusun buku panduan (<i>guiden</i>) berupa sejarah para Wali di Kabupaten Gresik dan ulama kharismatik yang makamnya ada di wilayah Kabupaten Gresik dengan melibatkan para nara sumber dari tokoh masyarakat dan ahli sejarah yang kompeten sehingga dapat mengamankan fakta sejarah dan memberikan wawasan bagi para investor yang akan berinvestasi di wilayah Kabupaten Gresik.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Isu strategis yang akan ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Gresik tahun 2015 tidak terlepas dari tema pembangunan nasional Tahun 2015 yaitu " Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Gresik melalui Perluasan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi Potensi Unggulan dan Peningkatan Infrastruktur yang Berkelanjutan ", isu strategis Provinsi Jawa Timur, serta isu strategis yang aktual dan faktual.

Adapun isu pembangunan nasional tahun 2015 meliputi :

1. Memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan energi
2. Mempercepat pengurangan kemiskinan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin
3. Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan dengan meningkatkan keterlibatan peran serta semua pemangku kepentingan
4. Peningkatan nilai tambah dan pemanfaatan sumber daya alam, bonus demografi potensi industri dan pasar domestik yang besar
5. penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan (pro-environment)

Sedangkan isu strategi RPJMD Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Tenaga Kerja
4. Lingkungan hidup

5. Pengembangan wilayah

Isu Strategis RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011 – 2015, dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan
2. Pendidikan
3. Reformasi Birokrasi dan Sumberdaya Aparatur
4. Pemberdayaan Masyarakat
5. Pertanian, Kelautan dan Perikanan
6. Kemiskinan
7. Kesehatan
8. Air Bersih
9. Ketenagakerjaan dan Kependudukan
10. Infrastruktur dan Pengembangan
11. Lingkungan Hidup dan Pariwisata
12. Energi dan Sumberdaya Mineral
13. Kesenian, Kebudayaan dan Olah Raga

Tabel 2.31 Permasalahan Bidang/Urusan Kabupaten Gresik

No.	Urusan	Permasalahan	Indikator Penentu keberhasilan
1.	Pendidikan	Pemerataan kesempatan belajar dapat dicapai melalui peningkatan dan pemeliharaan gedung sekolah, peningkatan pelayanan pendidikan luar sekolah serta bantuan biaya pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dicapai melalui peningkatan kualitas guru, peningkatan sarana penunjang belajar seperti buku, laboratorium dan ruang praktik, peningkatan manajemen sekolah, peningkatan metodologi pembelajaran.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara); Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B serta SMA/SMK/MA; Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs serta SMA/SMK/MA; Angka Kelulusan (AL) SD/MI, SMP/MTs serta SMA/SMK/MA; Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs; Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA; Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV.
2.	Kesehatan	Upaya yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan bayi, pelayanan kesehatan anak pra sekolah dan usia sekolah, pelayanan imunisasi, pelayanan pengobatan/perawatan, pelayanan kesehatan jiwa, pemantauan pertumbuhan balita, pelayanan gizi, pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar dan	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4; Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan; Cakupan Pelayanan Nifas; Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani; Cakupan Pelayanan Anak Balita; Cakupan Kunjungan Bayi; Cakupan Desa/kelurahan

No.	Urusan	Permasalahan	Indikator Penentu keberhasilan
		komprehensif, pelayanan gawat darurat, penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa dan gizi buruk, pencegahan dan pemberantasan penyakit endemis, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan pengendalian vektor, pelayanan hygiene sanitasi di tempat umum, penyuluhan perilaku sehat, penyuluhan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif (P3 NAPZA) berbasis masyarakat, pelayanan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, pelayanan penggunaan obat generik, penyelenggaraan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan perorangan, penyelenggaraan pembiayaan untuk keluarga miskin dan masyarakat rentan, pelayanan kesehatan kerja, pelayanan kesehatan lanjut usia, pelayanan gizi, pencegahan dan pemberantasan HIV-AIDS serta pelayanan dasar dan rujukan.	Universal Child Immunization (UCI); Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC (BTA+); Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD; Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin; Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan; Cakupan Balita yang Mendapat Vitamin A; Persentase Rumah Sehat; Ketersediaan Obat Sesuai Kebutuhan; Pengadaan Obat Esensial; Pengadaan Obat Generik; Cakupan Rawat Jalan; Cakupan Rawat Inap; Cakupan Rumah Tangga Sehat; Posyandu Purnama; Pelayanan pasien jamkesmas dan jamkesda; Bed Occupancy Rate; Average Length Of Stay; Turn Over Internal; Bed Turn Over.
3.	Pekerjaan Umum	Pemenuhan infrastruktur jalan dan jembatan dimaksudkan untuk mendukung pengembangan ekonomi di daerah. Ketersediaan jalan dan jembatan yang baik akan mampu mendorong pelaku ekonomi untuk mengembangkan usahanya di Kabupaten Gresik. Oleh karena itu pemerintah kabupaten harus mendorong tersedianya jalan dan jembatan yang memadai terutama untuk daerah pengembangan ekonomi yang telah direncanakan.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik; Jembatan kabupaten dalam kondisi baik; Panjang Jalan Poros Desa Yang Terbangun.
		Masih tingginya kondisi lingkungan pemukiman masyarakat yang belum layak	Rumah tangga pengguna air bersih; Lingkungan pemukiman kumuh; Rumah layak huni
4.	Tata Ruang	Dalam implementasi RTRW harus selalu dipantau, dikendalikan dan dievaluasi khususnya dalam hal pemanfaatan suatu wilayah agar tidak terjadi konflik kepentingan dimasyarakat	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB; Keberadaan Perda RTRW; Perubahan pemanfaatan fungsi kawasan RTRW.
5.	Perencanaan	adanya keterbatasan sumber daya daerah baik SDM maupun keuangan maka perencanaan daerah harus disusun secara efektif dengan berupaya menyiapkan dokumen	Ketersediaan RPJPD, RPJMD dan RKPD; Program RKPD yang diakomodasi dalam APBD.

No.	Urusan	Permasalahan	Indikator Penentu keberhasilan
		perencanaan yang baik agar pembangunan daerah yang dapat sustainable berkelanjutan dan memberi manfaat kepada masyarakat	
6.	Perhubungan	Meningkatnya jumlah kendaraan menimbulkan berbagai permasalahan lalu lintas yang perlu mendapat perhatian mengingat kebutuhan layanan transportasi cukup tinggi	Persentase ketersediaan angkutan darat; Persentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas; Persentase angkutan umum darat dalam kondisi layak jalan; Ketersediaan angkutan laut (penyeberangan); Pembangunan Bandara Domestik di Pulau Bawean; Persentase Permasalahan Bidang Perhubungan yang Diselesaikan.
7.	Lingkungan Hidup	pemanfaatan sumber daya alam agar terjaga kelestariannya maka diperlukan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan. Sehingga pengawasan pada lingkungan eksploitasi alam harus dilakukan secara ketat.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis; Produksi hasil hutan kayu jati dan non kayu jati.
		Terjadi penurunan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebagai akibat dampak dari berbagai kegiatan.	Luas Lahan Kritis; Rasio Luas Kawasan lindung; Persentase jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air; Persentase jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara; Luas RTH Perkotaan.
		Penanganan sampah masih sangat terbatas sehingga diperlukan upaya khusus agar persampahan dapat tertangani secara baik	Penanganan sampah; Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk; Pembangunan Pengolahan Sampah Terpadu (ERP).
8.	Pertanahan	Pelayanan pertanahan di daerah perlu dikoordinasikan antara pemerintah kabupaten dengan instansi pemerintah pusat badan pertanahan, sehingga diharapkan permasalahan pertanahan yang ada dapat diselesaikan untuk kepastian hukum di masyarakat.	Penyelesaian Kasus Tanah Negara.
9.	Kependudukan dan Catatan Sipil	Layanan administrasi kependudukan yang dilakukan berupa pelayanan KTP, KK dan akte catatan sipil harus terus ditingkatkan kualitasnya, sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan juga semakin meningkat.	Kepemilikan KTP; Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran; Pengurusan KTP

No.	Urusan	Permasalahan	Indikator Penentu keberhasilan
10.	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Perempuan seharusnya bukan hanya sebagai obyek pembangunan tetapi dapat lebih aktif menjadi subyek pembangunan. Perempuan harus dipacu kemampuannya agar terwujud kesetaraan gender di setiap bidang kehidupan dengan tetap menjaga martabat dan kehormatannya. Perlindungan lainnya dilakukan terhadap permasalahan tenaga kerja perempuan dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kemungkinan adanya kasus perdagangan (<i>human trafficking</i>) terhadap perempuan dan anak.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan P2T-P2A; Cakupan anak korban kekerasan yang tuntas mendapatkan penanganan pengaduan; Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum; Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas yang mampu terlaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit; Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan; Cakupan lembaga perempuan dan anak yang terfasilitasi. persentase Perempuan dalam pemerintahan Angka melek huruf perempuan
11.	Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera	Sebagai bagian dari program pengendalian jumlah penduduk, maka urusan ini memegang peranan penting dalam menekan pertumbuhan penduduk. Dengan didasari oleh kesadaran yang tinggi dari masyarakat tentang pentingnya pengendalian pertumbuhan penduduk maka pelayanan alat KB kepada pasangan usia subur harus ditingkatkan	Prevalensi peserta KB Aktif;Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun;Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmeet need);Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB);Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Di Setiap Desa/Kelurahan.
12.	Sosial	Masih tingginya PMKS yang memerlukan penanganan	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi; Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; Jumlah PMKS; Bantuan santunan Kematian; Penyaluran Raskin.
13.	Ketenagakerjaan	Menyediakan lapangan kerja yang layak bagi semua warganya merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten. Sehingga melalui kebijakan publik yang terencana dan jelas harus mampu menurunkan angka pengangguran terbuka	Tingkat partisipasi angkatan kerja; Pencari kerja yang ditempatkan; Angka pengangguran penduduk usia 15-24 tahun.

No.	Urusan	Permasalahan	Indikator Penentu keberhasilan
		kabupaten, menciptakan lapangan kerja baik formal maupun informal yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.	
		Agar dapat menjamin setiap pekerja memperoleh hak-haknya maka perlu dilakukan upaya pengawasan dan pembinaan terhadap pengusaha tentang perlindungan terhadap tenaga kerja, yang meliputi keselamatan kerja, kesehatan kerja, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja.	Kepatuhan terhadap Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Kepatuhan Terhadap Norma kerja; Kepatuhan Terhadap Norma Jaminan Sosial Tenaga kerja; Angka Kecelakaan Kerja; Angka Penuntasan/ penyelesaian perselisihan hubungan industrial; Pemberlakuan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Sama; Kepatuhan atas ketentuan mengenai Kepemilikan Lembaga Kerjasama Bipartit.
14.	Koperasi	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan sektor yang paling banyak menyerap pelaku ekonomi di kabupaten, sehingga upaya untuk memberdayakan dan melindungi kesinambungan usaha mereka harus dilakukan	Koperasi aktif; Usaha Mikro dan Kecil; Koperasi yang mendapatkan penilaian baik
15.	Penanaman Modal	Iklim investasi masih perlu mendapat perhatian utama mengingat kinerja belum maksimal	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN; Persentase Penyelesaian Permohonan : Ijin Lokasi, Ijin Pertambangan Daerah (SIPD), Ijin Gangguan (HO), Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Prinsip Ijin Usaha.
16.	Kebudayaan	Punahnya kekayaan seni dan budaya daerah harus ada upaya untuk melestarikan keberadaannya melalui pelaksanaan even budaya dan pemeliharaan cagar budaya.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya;Sarana penyelenggaraan seni dan budaya;Peninggalan / Cagar Budaya (Situs) yang dilestarikan.
17.	Pemuda dan Olah Raga	prestasi pemuda di daerah perlu dilakukan pembinaan dan ajang prestasi pemuda. Sedangkan untuk meningkatkan prestasi olahraga dilakukan melalui kerja sama dengan KONI kabupaten dan organisasi persatuan olahraga yang ada di daerah. Dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan diharapkan akan muncul pemuda dan olahragawan yang berprestasi di daerah.	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif; Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta); Lapangan Olah Raga; Persentase cabang olah raga yang aktif. Jumlah atlet berprestasi Jumlah Cabang olahraga yang berprestasi
18.	Kesbangpoldagri	Pemahaman, penghayatan dan pengamalan kehidupan beragama di Kabupaten Gresik masih belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan	Faktor keberhasilan dapat diwujudkan dengan adanya sarana ibadah yang semakin meningkat Meningkatnya Jumlah hari besar

No.	Urusan	Permasalahan	Indikator Penentu keberhasilan
		sehari-hari	yang dirayakan
		Perlunya menumbuhkan kesejahteraan batin dan ketentraman masyarakat untuk mendorong proses pembangunan yang lebih baik	Jumlah parpol yang dibina; Jumlah LSM, Ormas dan OKP yang dibina; Konflik yang dapat diselesaikan.
		Masyarakat kurang memahami terhadap aturan dan produk hukum pemerintah daerah	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dalam rangka penegakan PERDA di Kab. Gresik; Demo / protes terhadap PERDA/Perbup; Keberadaan PERDA tentang Penyelenggaraan Trantibum; Keberadaan PERDA tentang PSK dan Miras; Rasio Satpol PP terhadap jumlah penduduk.
19.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian	Pengawasan masih dirasakan kurang sehingga akan mempengaruhi kinerja dan pembangunan daerah	Prosentase rekomendasi atas temuan hasil pengawasan yang ditindak lanjuti; Prosentase LAKIP SKPD yang dievaluasi; Prosentase informasi masyarakat yang ditindak lanjuti.
		Sistem pemerintahan yang baik belum sepenuhnya terwujud	Konsultasi Pemerintahan Kabupaten dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah; Hasil Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKK LPPD).
		Pengelolaan keuangan yang tertib dan akurasi belum sepenuhnya terwujud dan aset-aset daerah yang belum efektif penggunaannya	Opini laporan keuangan; Laporan keuangan tersusun tepat waktu; APBD ditetapkan tepat waktu; Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005; Peningkatan PAD; Keberadaan kemandirian daerah; Perusahaan Daerah dalam kondisi sehat; Asset (Bangunan yang dipelihara dan dimanfaatkan).
		Agar legislatif sebagai mitra Pemerintah Kabupaten dapat berfungsi secara maksimal khususnya dalam hal penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten yang berfihak kepada kepentingan publik serta dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.	Voting yang dilakukan dalam sidang paripurna; Keterlibatan masyarakat dalam pembahasan raperda; Perda inisiatif DPRD.
		Aparatur yang profesional harus diwujudkan secara terus-menerus agar kinerjanya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat	Rasio pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai jenjangnya; Rasio jabatan yang terisi; Rasio Pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal; Rasio Pejabat yang telah

No.	Urusan	Permasalahan	Indikator Penentu keberhasilan
			memenuhi persyaratan kepengkatan. Kesesuaian SOTK SKPD dengan Pedoman / Peraturan tentang SOTK; Persentase SKPD yang telah dilakukan analisa jabatan.
		Masih kurangnya kerjasama daerah yang diciptakan, guna percepatan pengembangan sumber daya yang ada di Kabupaten Gresik	Jumlah MOU Kerjasama dengan Daerah/lembaga Lain dan Pihak Ketiga.
		Agar Sistem Pengadaan barang dan jasa dapat lebih akuntabel dan transparan	Keberadaan unit pelayanan pengadaan; Keberadaan E-procurement; Petugas yang lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
20.	Ketahanan Pangan	dijadikannya urusan pertanian menjadi prioritas pembangunan maka diharapkan surplus stok pangan daerah dapat semakin meningkat.	Regulasi ketahanan pangan; Ketersediaan pangan; Rata-rata konsumsi bahan pangan utama.
21.	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	Masih kurangnya aktivitas kelembagaan masyarakat untuk menjadikan masyarakat yang mandiri	PKK aktif; Posyandu aktif Persentase keluarga miskin
22.	Statistik	Perlunya data sebagai dasar dalam menentukan kebijakn pembangunan	Jenis –jenis data/ dokumen statistik yang disusun (Kabupaten dlm Angka, PDRB Kabupaten dan IPM).
23.	Kearsipan	Perlunya tertib arministrasi dalam mengelola arsip	Penerapan pengelolaan arsip secara baku.
24.	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan informasi sangat dibutuhkan dalam rangka mempererat hubungan antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat, sehingga dapat terjadi sinergi yang positif dalam pembangunan.	Keberadaaan Website Pemerintah Daerah; Pengunjung Website setiap tahun; Sistim informasi yang tersedia; Jumlah pemberitaan di media; Persuratan secara elektronik.
25.	Perpustakaan	meningkatkan kecerdasan masyarakat dilakukan upaya meningkatkan minat baca masyarakat. Diantaranya dengan cara meningkatkan aksesibilitas masyarakat kepada perpustakaan umum serta melakukan penambahan buku bacaan dan tempat baca yang lebih banyak di masyarakat.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah; Pengunjung perpustakaan; Jumlah anggota perpustakaan.
26.	Pertanian	Perlunya secara terus-menerus melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap petani agar dapat meningkatkan jumlah dan jenis produksi	Produksi pertanian meliputi padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar; Produksi sayuran meliputi bawang merah, sawi, kacang panjang, cabe, tomat, terong, ketimun, labu siam, kangkung dan bayam; Produksi buah meliputi jambu biji, jeruk, mangga, pepaya, pisang, belimbing, sawo dan sirsak.
		Pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi dilakukan	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik;

No.	Urusan	Permasalahan	Indikator Penentu keberhasilan
		untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian. Oleh karena itu upaya prioritas dalam pengelolaan air adalah ketersediaan air untuk pertanian.	Panjang saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik; Bendung Gerak Sembayat.
27.	Kehutanan	Produksi perkebunan di Kabupaten Gresik cukup mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan potensi perkebunan.	produksi hasil perkebunan yang terdiri dari tembakau, tebu, kelapa, cengkeh, kopi, jambu mente, kapuk randu, kakao, kunyit dan siwalan.
28.	Energi sumberdaya mineral	Eksplorasi yang berlebihan tanpa mempertimbangkan kelestariannya akan menyebabkan potensi tersebut menjadi habis dan hilang. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan terhadap pertambangan yang ada di masyarakat.	Persentase ABT berijin yang membayar pajak.
29.	Pariwisata	Untuk meningkatkan pariwisata daerah salah satu ukurannya adalah jumlah kunjungan wisatawan. Untuk itu perlu dikembangkan obyek-obyek pariwisata daerah yang dapat menarik kunjungan masyarakat. Disamping itu, agar kunjungan dapat meningkat perlu terjalin koordinasi dan kerjasama dengan pengusaha pariwisata baik di dalam maupun luar Kabupaten.	jumlah kunjungan wisata
30.	Kelautan dan perikanan	Agar dapat mengembangkan sektor perikanan perlu dilakukan peningkatan produksi perikanan budidaya dan perairan umum. Untuk itu diperlukan jumlah benih ikan yang cukup.	Jumlah produksi perikanan yang meliputi budi daya, penangkapan dan perairan umum; Produktivitas lahan tambak meliputi air payau dan tawar.
		Kebutuhan akan penyediaan daging ternak terus meningkat	persediaan kebutuhan daging, susu dan telur serta populasi binatang ternak.
31.	Perdagangan	Perlunya secara terus menerus menumbuh kembangkan perdagangan, pasar dan usaha lainnya agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat secara konsisten	Pertumbuhan Penerbitan SIUP, TDP dan TDG; Pertumbuhan nilai investasi perdagangan; Jumlah Pameran / Ekspo Per Tahun.
32.	Industri	Pertumbuhan sektor industri masih dirasakan belum optimal sehingga perlu dilakukan langkah-langkah implementasi	Pertumbuhan Industri; Pertumbuhan Nilai Produksi.
33.	Ketransmigrasian	Perlunya meningkatkan pelayanan ketransmigrasian mengingat diperlukan kesiapan dan	Pembinaan calon transmigran

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI

DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Penyusunan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik 2011-2015, mengacu pada RKP Tahun 2015 yang berpedoman pada RPJMN Tahun 2010 – 2014 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2014. Tujuannya agar terjalin keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan, dalam mewujudkan arah kebijakan dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibangun pada tahun tersebut. Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah ini, akan dipedomani untuk kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan adalah elemen yang tidak bisa dipisahkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena pertumbuhan ini, dapat menggambarkan terjadinya peningkatan dan perluasan kesempatan kerja baru bagi masyarakat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang positif memungkinkan suatu daerah untuk meningkatkan kemampuannya dalam melakukan akumulasi modal dan mamacu inovasi teknologi yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas, dapat berimplikasi positif pada penghasilan yang diterima masyarakat. Apabila hal ini berkelanjutan, tingkat kesejahteraan rakyat akan meningkat.

Terciptanya stabilitas ekonomi makro merupakan kondisi yang tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan prasyarat pertumbuhan ekonomi. Perekonomian nasional hanya dapat memberikan kinerja yang baik apabila didukung oleh kestabilan ekonomi yang kokoh.

Stabilitas ekonomi juga didukung oleh kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Tingkat defisit atau utang yang terlalu tinggi akan meningkatkan ketidakpercayaan swasta kepada pemerintah. Kebijakan anggaran defisit akan mendorong pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan. Dalam rangka terciptanya stabilitas ekonomi yang kokoh, diharapkan tingkat inflasi dapat dijaga pada tahun 2014.

Pembangunan ekonomi inklusif adalah pembangunan yang memberikan kesempatan pada seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses pertumbuhan ekonomi dengan status setara, terlepas dari latar belakang mereka. Dengan demikian, pembangunan ekonomi inklusif menciptakan kesempatan bagi semua dan memastikan akses yang sama terhadap kesempatan tersebut.

Pencapaian pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan didukung oleh kebijakan pada sektor tenaga kerja, kemiskinan, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Disisi kebijakan tenaga kerja, kebijakan-kebijakan seperti pelatihan, pembekalan, pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dapat memberikan tambahan skill bagi tenaga kerja sehingga memudahkan untuk dapat mengisi lowongan kerja yang tersedia. Dengan demikian, semakin banyak orang terlibat dalam proses pembangunan.

Terkait dengan kebijakan pengurangan kemiskinan, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan memiliki kaitan yang sangat erat. Pembangunan ekonomi yang inklusi dan berkeadilan dapat memiliki dampak positif terhadap agenda pengurangan kemiskinan. Hal ini dapat ditempuh melalui (1) dampak pertumbuhan ekonomi akan meningkat ketika kesenjangan berhasil diatasi, (2) pembangunan ekonomi yang inklusif dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pengurangan kemiskinan dengan memfokuskan pada penciptaan dan pemberian akses yang sama pada kesempatan kerja. Dengan begitu mereka yang selama ini miskin karena tidak pernah mendapat kesempatan, dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk keluar dari kemiskinan.

Sebaliknya, kebijakan pengurangan kemiskinan melalui pemberian bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan dan kesehatan) juga akan memberikan dukungan pada terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Selain kebijakan ketenaga kerjaan dan kebijakan dalam pengurangan kemiskinan, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan harus didukung oleh kebijakan UKM untuk pengembangan UKM. Dengan keterbatasan sektor formal untuk menampung tenaga kerja, kesempatan bagi mereka yang tidak tertampung untuk turut serta dalam proses pembangunan adalah melalui sektor-sektor informal.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Gresik

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan pembagian pendapatan masyarakat dan meningkatkan hubungan ekonomi regional.

Arah kebijakan Ekonomi daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 mengacu kepada Misi ke-3 yaitu Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten Gresik, dengan memperhatikan kondisi

ekonomi nasional dan global, serta peningkatan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Gresik, yang berbasis pada potensi lokal dalam upaya meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Semakin besar daya beli masyarakat, maka semakin kecil tingkat kemiskinan pada suatu daerah. Kebijakan-kebijakan diutamakan disektor industri, jasa dan perdagangan, dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan sistem pemasaran produk unggulan/andalan,
- 2) Mengembangkan industri kecil dan menengah
- 3) Revitalisasi kelembagaan dan usaha koperasi melalui pembinaan intensif
- 4) Meningkatkan investasi di daerah melalui instrumentasi prosedur pelayanan investasi serta pengembangan kawasan industri dan infrastruktur
- 5) Mengembangkan jaringan pemasaran produk pertanian
- 6) Optimalisasi sumberdaya pertanian baik penyuluh maupun petani
- 7) Mengembangkan komoditas perkebunan, melalui kimbun (kawasan industri masyarakat perkebunan)
- 8) Meningkatkan wilayah pengembangan sentra-sentra produksi dan populasi peternakan serta didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana produksi peternakan
- 9) Optimalisasi pemanfaatan hutan dan lahan serta pengembangan tanamannya secara berkelanjutan
- 10) Meningkatkan produksi perikanan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap perairan umum, kolam, laut dan tambak
- 11) Meningkatkan pembinaan atas usaha/kegiatan yang berpotensi mengakibatkan pencemaran pada tanah, air, dan udara
- 12) Meningkatkan penanganan sampah secara berkelanjutan dengan mendorong swadaya masyarakat
- 13) Meningkatkan kelancaran angkutan orang, barang dan jasa serta peningkatan keselamatan lalu lintas jalan
- 14) Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
- 15) Mengembangkan produk-produk wisata dan meningkatkan promosi
- 16) Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan
- 17) Meningkatkan pelayanan irigasi
- 18) Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pendapatan di bidang energi dan sumber daya mineral daerah

Untuk keberlanjutan sistem ekonomi yang stabil melalui peningkatan sistem pemasaran produk unggulan perlu dilakukan langkah-langkah konkrit dalam mengembangkan hubungan dan relasi, kemitraan dengan berbagai pihak untuk dapat memberikan dukungan terhadap pemasaran hasil produk, sehingga produk unggulan dapat lebih dikenal masyarakat local maupun nasional, dapat lebih terjaga kualitas produknya dan dapat lebih luas menjangkau konsumen. Dan dengan meningkatnya jangkauan pasar terhadap produk unggulan, maka akan terjadi peningkatan produksi dan secara langsung akan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Untuk dapat mengembangkan industri menengah dan kecil, serta revitalisasi kelembagaan dan usaha koperasi dilakukan upaya pembinaan intensif untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif, penataan peraturan perundang-undangan di bidang koperasi dan UMKM, pengembangannya, pengendalian dan pengawasan koperasi. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia koperasi dan industri menengah kecil, yang mencakup masyarakat dan pengembangan kewirausahaan, kapasitas dan kompetensi SDM, penyediaan layanan pengembangan bisnis serta peningkatan peran serta masyarakat dalam mengembangkan koperasi

Peningkatan kualitas organisasi memperkuat lembaga koperasi, badan hukum dan ketatalaksanaan koperasi, pengembangan keanggotaan koperasi melalui berbagai gerakan masyarakat sadar koperasi, dan pengembangan program pendanaan dan pemodalan.

Arah kebijakan investasi adalah meningkatkan iklim investasi yang berdaya saing. Strategi untuk mencapai sasaran investasi tahun 2015 antara lain penyederhanaan prosedur investasi melalui Pemantapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan mengembangkan dan meningkatkan efektivitas strategi promosi investasi dan mengembangkan infrastruktur agar kemudahan dalam akses menuju lahan/area untuk berinvestasi serta mengembangkan area kawasan industri. Penciptaan iklim investasi yang mendukung pengembangan potensi lokal, pengembangan model kemitraan usaha hulu-hilir.

Pengembangan sektor pertanian sesuai potensi wilayah merupakan ujung tombak terpenting dalam mendorong pembangunan ekonomi. Pengembangan pusat industri berbasis pertanian sebagai bagian dari sistem pertanian modern akan mendorong pengembangan sektor pertanian dengan seluruh sub sektor dan sektor sektor lainnya.

Pemasaran produk pertanian diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah di tingkat petani, pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan. Pengembangan konsep strategis agrobisnis dan agropolitan,

minapolitan untuk mengatasi daya saing dalam pemasaran serta untuk mengatasi pentingnya efisiensi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi produk-produk pertanian. Menumbuhkan dan mengembangkan kemitraan-kemitraan dengan berbagai pihak sebagai penguatan jaringan dalam pemasaran produk.

Optimalisasi sumberdaya pertanian baik penyuluh maupun petani, untuk meningkatkan kemampuan tenaga penyuluh dan petani diarahkan menuju revitalisasi tenaga penyuluh untuk pendampingan bagi petani, peternak, nelayan dan pembudidaya ikan.

Perubahan kualitas udara dan atmosfer yang terjadi secara berkelanjutan dapat mengakibatkan akumulasi berbagai unsur dan senyawa yang membahayakan bagi kelangsungan kehidupan ekosistem dan pada akhirnya akan dapat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan yang dapat menurunkan pendapatan dan perekonomian masyarakat. Kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada pertumbuhan jangka pendek telah memicu pola produksi dan konsumsi yang agresif, eksploitatif dan ekspansif sehingga daya dukung dan fungsi lingkungan hidup makin menurun bahkan mengarah pada kondisi yang mengkhawatirkan. Sumber daya alam senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama untuk menginternalisasikan ke dalam kebijakan dan peraturan.

Pertumbuhan penduduk yang pesat meningkatkan jumlah timbulan sampah, sehingga pelayanan dalam pengelolaan sampah dirasakan selalu kurang optimal, sehingga perlu diterapkan sistem pengelolaan sampah secara mandiri, mengingat keterbatasan sumber daya lahan untuk TPA dan tingginya biaya penyediaan pelayanan dan fasilitas penanganan persampahan.

Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Transportasi merupakan urat nadi perekonomian, sehingga usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan sangat tergantung pada infrastruktur transportasi. Pembangunan transportasi diarahkan untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, andal, berkualitas, aman dan harga terjangkau. Pemerataan pelayanan transportasi secara adil juga diarahkan agar setiap lapisan masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pelayanan jasa transportasi secara mudah, murah, berkualitas dan terjangkau.

Perluasan lapangan kerja diberbagai sektor, terutama di sektor pertanian, industri dan jasa, serta perlindungan tenaga kerja, diharapkan mampu mengurangi jumlah penganggur maupun setengah penganggur dan kesenjangan antar sektor.

Kualitas tenaga kerja yang umumnya memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang masih rendah berpengaruh pada peluang terserapnya lapangan kerja, sehingga menambah tingkat pengangguran setiap tahunnya. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah pembinaan, pendidikan dan pelatihan secara terus menerus untuk meningkatkan ketrampilan dan kemampuan serta merumuskan kebijakan-kebijakan ketenaga kerjaan yang dapat melindungi pihak-pihak yang berkepentingan dengan peraturan yang tidak berpihak kepada pengusaha maupun buruh. Memfasilitasi pemerintah Kabupaten Gresik untuk menetapkan upah minimum regional (UMR) berdasarkan sistem upah sektoral, menyempurnakan program pendukung pasar kerja dengan mendorong terbentuknya informasi pasar kerja, membentuk berbagai bursa kerja, serta memperbaiki sistem pelatihan bagi pencari kerja. Menciptakan iklim dan lingkungan dunia usaha yang kondusif bagi peningkatan investasi yang mendorong penciptaan kesempatan kerja, suasana berusaha lebih sehat, kepastian hukum dan peningkatan infrastruktur.

Penataan dan pengembangan sektor informal perkotaan, terutama pedagang kaki lima melalui penyediaan fasilitas tempat usaha yang strategis, sehat dan tidak mengganggu kegiatan usaha lainnya serta tidak merusak lingkungan.

Pembangunan kepariwisataan yang merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan potensi daerah, diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, melalui penguatan pariwisata berbasis masyarakat dengan memanfaatkan potensi pariwisata budaya/religi, bahari dan pulau Bawean, dengan tetap memperhatikan akses manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipasi masyarakat, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan dan berpegang pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan iptek.

Arah kebijakan diutamakan pada pengembangan produk-produk wisata dan promosi wisata melalui beberapa upaya peningkatan daya tarik wisata, mendorong dan memfasilitasi perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata, konsolidasi akses transportasi. Mengembangkan usaha, industri dan investasi pariwisata, terutama yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja antara lain melalui penciptaan iklim yang kondusif dengan penataan kebijakan usaha pariwisata, penyusunan dan penerapan legalitas usaha, pengaturan usaha dan kompetensi tenaga kerja bidang kepariwisataan.

Peningkatan sistem pemasaran dan promosi pariwisata secara efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, responsif terhadap pasar, pengembangan analisa dan informasi pasar.

Mengembangkan sumber daya pariwisata melalui penguatan sumberdaya pariwisata dengan mendorong peningkatan kapasitas pemerintah, pemangku kepentingan pariwisata untuk mencapai tingkat dan mutu pelayanan yang kompetitif, pengembangan dan penguatan kelembagaan kepariwisataan, dan mendorong peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan kepariwisataan.

Kebijakan pembangunan pariwisata harus didukung dengan peningkatan koordinasi lintas sektor terutama dibidang : keamanan dan ketertiban, prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan kesehatan lingkungan. Transportasi darat laut dan udara. Promosi dan terjalin kerjasama antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

Pembangunan Infrastruktur adalah bagian integral dari pembangunan regional maupun nasional. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi, ketersediaan infrastruktur yang memadai dan kesinambungan merupakan kebutuhan yang mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing daerah. Berkaitan dengan arah kebijakan peningkatan kualitas jalan dan jembatan, maka diperlukan kegiatan yang menitikberatkan pada pemeliharaan rutin berkala dan perbaikan ruas jalan, sehingga layak digunakan untuk kepentingan mobilitas masyarakat. Pemeliharaan rutin berkala dan perbaikan jembatan, sehingga layak digunakan untuk kepentingan mobilitas masyarakat. Perbaikan prasarana jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana alam.

Air merupakan kebutuhan pokok untuk melangsungkan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraannya. Pembangunan dibidang sumberdaya air pada dasarnya merupakan upaya membuka dan memperluas akses secara adil kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan air agar mampu hidup lebih nyaman dan lebih sejahtera. Ketersediaan air yang sangat melimpah pada musim hujan, selain memberi manfaat, pada saat yang sama juga menimbulkan potensi bahaya kemanusiaan berupa banjir dan tanah longsor. Sedangkan pada musim kemarau, kelangkaan air menimbulkan kekeringan yang berkepanjangan. Kerusakan lingkungan yang semakin luas akibat kerusakan hutan secara signifikan telah menyebabkan penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam menahan dan menyimpan air. Berkembangnya daerah pemukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air.

Bencana alam banjir yang terjadi dan berulang di berbagai wilayah di Kabupaten Gresik, khususnya pada musim penghujan, mengakibatkan kerusakan pada prasarana sumber daya air sehingga menurunkan kapasitas aliran air.

Arah kebijakan menitik beratkan pada mengedepankan pembangunan tampungan air berskala kecil. Dan pembangunan tampungan skala besar untuk pemenuhan kepentingan jangka panjang sehingga tercipta pola pengelolaan sumberdaya air yang lebih beerkeadilan. Meningkatkan pelestarian waduk, bendungan dan embung, serta pengamanan daerah aliran sungai untuk melindungi sumber daya air dan bencana banjir. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi, difokuskan pada peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi areal irigasi berfungsi dan rusak dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan dan pemakaian air untuk kebutuhan petani melalui HIPPA

Potensi energi sumberdaya mineral dikembangkan menuju pada peningkatan pendapatan daerah dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui eksploitasi sumber daya mineral dan migas secara efisien dan berkelanjutan. Berbagai kegiatan migas dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat mengingat ketersediaan energi akan meningkatkan daya saing daerah dalam penyediaan utilitas. Kegiatan pertambangan galian C yang dapat merubah bentang alam secara sporadis, selain memberikan pendapatan daerah, dilain pihak memberikan dampak kerusakan lingkungan, oleh karena itu pengawasan dan pengendalian dan pemantauan, penataan dan pengaturan lahan pasca tambang sebagai upaya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2015.

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator, antara lain yaitu : (1). Laju Pertumbuhan Ekonomi; (2). Produk Domestik Regional Bruto; (3). Pendapatan Perkapita; (4) Inflasi; (5) Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk.

Laju Pertumbuhan ekomoni daerah di Kabupaten Gresik berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Propinsi Jawa Timur pada Tahun 2012 sebesar 7,43 %, atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Timur sebesar 7,27 % dan pertumbuhan nasional sebesar 6,23%. Tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik diestimasi mencapai 7,5% sama dengan estimasi pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Timur sebesar 7,5 %, sedangkan estimasi pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 6,5 sampai 6,7%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik pada tahun 2013

sebesar 7,6 %, pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Timur berkisar 7,5 sampai 7,7% dan pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 6,5 sampai 6,7%.

Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Gresik telah memberikan dampak pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 50.976.371.490.000,00 pada Tahun 2012. Tahun 2013 diestimasi meningkat menjadi Rp. 58.862.513.120.000,00 dan Tahun 2014 diproyeksi mencapai Rp. 68.246.133.670.000,00.

Dengan perkembangan nilai PDRB yang terus meningkat dan struktur perekonomian daerah yang kuat yang didominasi sektor industri, sektor perdagangan dan sektor pertanian telah mendukung terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama pada pendapatan perkapita.

Pada Tahun 2011, Pendapatan Perkapita sebesar Rp.37.452.035,46, tahun 2012 diestimasi sebesar Rp.39.598.649,83, tahun 2013 diperkirakan naik menjadi Rp.45.061.469,76 dan tahun 2014 diproyeksikan mencapai Rp51.364.370,94.

Laju inflasi PDRB pada tahun Tahun 2012 sebesar 7,09 persen. Secara berturut-turut, sampai dengan tahun 2014, laju inflasi PDRB diharapkan bisa terus menurun. Pada Tahun 2013, diharapkan turun menjadi 6 % dan tahun 2014 menjadi 5 %.

Statistik demografi Kabupaten Gresik menunjukkan pertumbuhan penduduk yang meningkat. Pada tahun 2011 jumlah penduduk Kabupaten Gresik adalah 1.270.351 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 2,9% pada tahun 2012 naik menjadi 1.307.995 atau mengalami kenaikan sebanyak 37.644 jiwa. Pada Tahun 2013 jumlah penduduk di Kabupaten Gresik diestimasi bertambah menjadi 1.331.788 jiwa dan Tahun 2014 diproyeksi menjadi sebanyak 1.352.904 jiwa.

Tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan ekonomi di Kabupaten Gresik dari tahun ke tahun menunjukan arah positif. Ditinjau dari struktur perekonomian yang ada, pilar utamanya adalah industri pengolahan. Terhadap sumbangannya pada PDRB ADHB Tahun 2012, sektor industri pengolahan menyumbang 49,31 % dari seluruh konstruksi ekonomi daerah Gresik. Dengan banyaknya industri tersebut akan ada kecenderungan semakin cepat berdiri industri baru yang merupakan mata rantai industri yang saling menunjang. Dengan demikian sektor Industri merupakan sektor yang bisa diharapkan memulihkan perekonomian kabupaten Gresik, karena sektor ini disamping menyerap banyak tenaga kerja juga menggerakkan perkembangan sektor-sektor yang lain.

Perdagangan, Hotel dan Restoran merupakan sektor yang sangat erat dengan sektor Industri, sehingga mempunyai sumbangan di urutan kedua,

yaitu sebesar 24,44 % pada tahun 2012 yang sebelumnya sebesar 23,09 % pada tahun 2011.

Wilayah kabupaten Gresik yang memanjang dari utara ke selatan atau dari kecamatan Panceng hingga kecamatan Wringinanom sejauh lebih dari 82 km, apalagi jika ditambah dengan kecamatan Tambak di pulau Bawean menjadi berjarak lebih dari 208 km, ternyata kabupaten Gresik masih memiliki potensi sektor Pertanian yang cukup besar. Sektor Pertanian mempunyai peranan di urutan ketiga yakni sebesar 8,61 % di tahun 2012.

Ketiga sektor tersebut di atas selalu menunjukkan kecenderungan menguat dari tahun ke tahun, oleh karena itu perlu terus didukung dengan kebijakan-kebijakan efektif menyangkut iklim usaha, sarana dan prasarana serta komitmen pengembangannya.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016

Dengan arah kebijakan ekonomi dan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, pada tahun 2014 dan 2015 perlu adanya kebijakan pemerintah untuk dapat menstabilkan dan mengakselerasikan, mendorong dan meningkatkan pencapaian kondisi pertumbuhan perekonomian daerah, melalui berbagai upaya untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang terjaga dengan baik, pertumbuhan investasi yang terus meningkat, pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang semakin ditekan melalui beberapa program prioritas dan upaya sinergitas dengan dukungan kebijakan pusat maupun Propinsi Jawa Timur. Potensi ekonomi yang relatif besar disektor industri, jasa dan perdagangan, migas, pertanian dan mengedepankan ekonomi kerakyatan diharapkan dapat berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan.

Sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintah Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah), Dana Perimbangan (meliputi dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus), dan Lain-lain pendapatan yang sah (meliputi hibah, dana Darurat, Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya).

a. Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2015 PAD diproyeksikan sebesar Rp. 668.313.618.000,00 yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp. 396.070.500.000,00, Retribusi Daerah Rp. 120.388.863.000,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 21.976.500.000,00 Dan lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 129.877.755.000,00.

b. Dana Perimbangan

Selain dari PAD salah satu sumber pendanaan bagi APBD adalah dana perimbangan yang merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana Alokasi Khusus (DAK). Pada Tahun 2015 dana perimbangan diproyeksikan sebesar Rp. 1.206.373.521.705,38 terdiri atas dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 185.021.256.372,49, Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 949.301.005.332,88 Sedangkan Dana alokasi Khusus sebesar Rp. 72.051.260.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada Tahun 2015 alokasi Dana Lain-lain Pendapatan yang Sah diproyeksikan sebesar Rp. 391.681.849.000,00, sebesar Rp. 150.000.000.000,00 dari Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya. Sebesar Rp. 224.596.214.000,00 dari Dana penyesuaian dan otonomi khusus dan Dana Bantuan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp. 17.085.635.000,00.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah), Dana Perimbangan (meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus), Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah (meliputi Hibah, Dana Darurat, Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya) dan Pembiayaan Daerah (meliputi penerimaan pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Pencairan dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan penerimaan Piutang Daerah).

Kebijakan pendapatan daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2015 mengacu kepada arah kebijakan pendapatan yang tertuang dalam RPJMD 2011 – 2015 disesuaikan dengan kewenangannya, struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Kebijakan pendapatan asli daerah dilakukan dengan berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi :
 - a. Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli daerah dengan cara : membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara peraturan daerah pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai kebutuhan daerah, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - b. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pengutannya. Melakukan optimalisasi sumber pendapatan asli daerah lainnya ;
 - c. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah ;
 - d. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
 - e. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan SKPD Penghasil;
 - f. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;

- g. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah ;
 - h. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.
2. Dana Perimbangan yaitu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN. Kebijakan yang akan ditempuh untuk meningkatkan pendapatan daerah dari APBN adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan.
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan
 3. Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari dana Bagi Hasil Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.208.000.000.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.1.192.000.000.000,00. Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2015 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proposional, efisien dan efektif, dengan menitik beratkan pada :

1. Prioritas pembangunan daerah dan program unggulan
2. Program dan kegiatan pada setiap SKPD (rutin);
3. Program urusan wajib dan urusan pilihan;
4. Program bantuan keuangan lainnya;
5. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan pangan);
6. Penguatan program-program penanganan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat;
7. Stimulasi pertumbuhan ekonomi (sektor riil, subsidi bunga, penjaminan kredit bagi UKMK).
8. Melanjutkan proyek strategis (*multi years project*);
9. Penanganan bencana alam dan pasca bencana alam.

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terbagi dalam dua komponen besar yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pada Tahun 2015 arah kebijakan pembiayaan adalah sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SILPA) ; pencarian dana cadangan ; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan ; penerimaan pinjaman daerah ; penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2014 adalah :

1. Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SILPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SILPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.
2. Jika terjadi defisit anggaran akan diupayakan dengan pemanfaatan pinjaman melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program/kegiatan strategis lainnya.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok hutang; dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2012 adalah :

- a. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD
- b. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman jika terjadi surplus anggaran.

Tabel berikut menunjukkan arah kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan nilai nominal yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, sebagai berikut:

**Realisasi,Target dan Proyeksi Pendapatan, Belanja Pembiayaan Daerah
Tahun 2012 s.d Tahun 2015
Kabupaten Gresik**

NO	URAIAN	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Proyeksi 2015
4	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.650.603.336.995,55	1.840.585.216.921,17	2.076.073.337.746,00	2.438.353.520.713,73
4 1	Pendapatan Asli Daerah	427.588.705.990,55	502.796.031.996,17	636.489.160.000,00	879.637.044.318,74
4 1 1	Hasil Pajak Daerah	252.405.752.927,50	287.204.002.798,08	377.210.000.000,00	511.235.171.515,50
4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	57.001.107.843,10	68.748.761.969,35	114.656.060.000,00	143.953.978.735,68
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.981.313.161,33	19.586.929.857,01	20.930.000.000,00	36.821.983.837,76
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	109.200.532.058,62	127.256.337.371,73	123.693.100.000,00	187.675.910.229,80
4 2	Dana Perimbangan	947.619.650.810,00	996.197.113.935,00	1.106.836.086.746,00	1.206.373.521.705,38
4 2 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	153.246.269.810,00	142.187.422.935,00	171.387.307.746,00	185.021.256.372,49
4 2 2	Dana Alokasi Umum	711.868.321.000,00	804.903.511.000,00	863.397.519.000,00	949.301.005.332,88
4 2 3	Dana Alokasi Khusus	82.505.060.000,00	49.106.180.000,00	72.051.260.000,00	72.051.260.000,00
4 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	275.394.980.195,00	341.592.070.990,00	332.748.091.000,00	352.342.954.689,62
4 3 3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	104.040.169.195,00	124.619.730.990,00	121.100.000.000,00	140.694.863.689,62
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	132.383.521.000,00	199.836.702.000,00	192.596.214.000,00	192.596.214.000,00
4 3 5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	38.971.290.000,00	17.135.635.000,00	10.051.877.000,00	19.051.877.000,00

**Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja daerah
Tahun 2012 s.d Tahun 2015
Kabupaten Gresik**

NO	URAIAN	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target 2014	Proyeksi 2015
2,1	Belanja Tidak Langsung				
2.1.1	Belanja Pegawai	692,857,652,655,95	706,944,346,102,00	764.668.822.630,00	882.197.641.640,55
2.1.2	Belanja Bunga	600,892,650,43	329,156,539,11	308.564.814,00	
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	128.700.000,00	
2.1.4	Belanja hibah	104,850,456,000,00	107,818,513,200,00	111.202.416.000,00	190.992.170.052,55
2.1.5	Belanja bantuan sosial	17,500,125,345,00	16,870,050,000,00	32.176.700.000,00	33.567.618.801,90
2,1.6	Belanja bagi hasil kpd provinsi/ka/kota dan Pemerintah	0,00	0,00	4.540.846.800,00	5.000.000.000,00
2,1.7	Belanja bantuan keuangan kpd provinsi/kab/kota dan Pemerintah	107,062,942,300,00	160,020,833,800,00	182.719.894.700,00	210.607.356.135,79
2,1.8	Belanja tidak terduga	1,220,210,057,00	761,601,000,00	3.000.000.000,00	
B.	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	924,092,279,008,38	992,744,500,641,11	1.098.745.944.944,00	1.325.364.786.630,78
2.2	Belanja Langsung				
2.2.1	Belanja Pegawai	80,810,922,834,00	120,755,307,751,00	86.622.457.331,00	91.462.512.662,76
2.2.2	Belanja Barang dan jasa	286,798,862,532,00	366,033,201,747,21	454.140.791.154,00	555.075.223.380,61
2.2.3	Belanja Modal	159,428,666,382,00	417,766,098,409,00	561.010.570.062,00	778.310.731.423,39
C.	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	527,038,521,748,00	904.554.607.907,21	1.101.773.818.547,00	1.424.848.467.466,76
D.	TOTAL JUMLAH BELANJA	1.451.130.800.756,38			

**Realisasi,Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Tahun 2012 s.d Tahun 2015
Kabupaten Gresik**

No.	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Target Tahun 2014	Proyeksi 2015
1	2	3	4	5	6
3.1	Penerimaan Pembiayaan	100,746,257,035	249,199,940,539,44	127.197.904.382,00	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	100,038,329,669,23	249,199,940,539,44	127.197.904.382,00	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00		
3.1.3	Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00		
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0,00	0,00		
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	707,927,366,00			
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	0,00	0,00		
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100,746,257,035,23	249,199,940,539,44		
3.2	Pengeluaran pembiayaan	51,018,852,734	13,253,209,399,96	1.666.666.667,00	
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0,0	0,0		
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	45,289,000,000	10,680,000,000,00		
3.2.3	Pembiayaan pokok utang	5,729,852,734,96	2,573,209,399,00	1.666.666.667,00	
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0,00	0,00		
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	51,018,852,734,96			
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	49,727,404,300,27			

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Selain itu, dalam penyusunan prioritas dan sasaran juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Gresik tahun 2015 disusun mengacu pada:

a. Visi Pemerintah Kabupaten Gresik tahun 2011-2015 yaitu:

"Gresik yang Agamis, Adil, Makmur dan Berkehidupan yang Berkualitas".

b. Misi Pemerintah Kabupaten Gresik tahun 2011-2015 yaitu:

- 1. Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri**
- 2. Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik**
- 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan**
- 4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya**

Uraian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Gresik tahun 2015 berdasarkan pengelompokan Misi pada RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2011-2015 dapat dilihat melalui tabel matrik sebagai berikut:

Table 4.1 matrik Misi Tujuan dan Sasaran

Gresik yang Agamis, Adil, Makmur dan Berkehidupan yang Berkualitas		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi ke-1 : Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri	Meningkatnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun, saling menghormati dan demokratis	1. Meningkatkan aktivitas keagamaan 2. Meningkatkan suasana yang sejuk, santun dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 3. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda 4. Meningkatkan perlindungan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan 5. Meningkatkan perlindungan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan
Misi ke-2 : Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya pelayanan publik yang adil dan merata	1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan 2. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sosial 3. Meningkatkan sarana dasar pemukiman 4. Meningkatkan kualitas produk hukum dan kepastian hukum 5. Meningkatkan penyelenggaraan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah 6. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah 7. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan aset daerah 8. Meningkatkan peran legislatif dalam tugas pemerintahan 9. Meningkatkan pengelolaan aparatur yang profesional 10. Meningkatkan kerjasama daerah 11. Meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa 12. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan 13. Meningkatkan sistem komunikasi informasi dan media massa 14. Meningkatkan penanganan pertanahan 15. Meningkatkan penataan kawasan daerah sesuai RTRW 16. Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan 17. Tersedianya data statistik daerah yang akurat dan tepat waktu 18. Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah

		yang tertib rapi dan handal 18. Terselenggaranya pelayanan ketransmigrasian
Misi ke-3 : Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Terwujudnya pelayanan publik yang adil dan merata	1. Meningkatnya usaha perdagangan 2. Meningkatnya sektor industri 3. Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) 4. Meningkatnya investasi di daerah 5. Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura 6. Meningkatnya produksi hasil perkebunan 7. Meningkatnya produksi dan populasi peternakan 8. Meningkatnya rehabilitasi dan konservasi lingkungan 9. Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan 10. Meningkatnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup 11. Meningkatnya penanganan persampahan 12. Meningkatnya pelayanan dan transportasi daerah yang aman, lancar dan terjangkau 13. Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja 14. Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja 15. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata 16. Meningkatnya sarana infrastruktur daerah 17. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi 18. Meningkatnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral daerah
Misi ke-4 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya .	1. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia sekolah 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 3. Meningkatnya pelayanan keluarga berencana 4. Meningkatnya minat baca masyarakat 5. Meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat 6. Meningkatnya prestasi olah raga daerah

4.2. Prioritas Pembangunan

Tahun 2015 merupakan tahun ke-lima implementasi RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2011-2015. Merujuk pada kondisi tersebut maka RKPD Tahun 2015 merupakan kelanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi.

Table 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

	Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)		Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
1.	Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan	1.	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan
2.	Pendidikan	2.	Peningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan.
3.	Reformasi Birokrasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur	3.	Perluasan Lapangan Kerja.
4.	Pemberdayaan Masyarakat	4.	Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Daerah Tertinggal serta Peningkatan Peran Perempuan dan Pengarusutamaan Gender.
5.	Pertanian, Kelautan dan Perikanan	5.	Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis
6.	Kemiskinan	6.	Pemerataan dan Pertumbuhan perekonomian melalui: Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peningkatan Investasi dan Daya Saing Industri
7.	Pembangunan dan Pengembangan Perekonomian	7.	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Penyediaan Energi dan Kelestarian Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Penanggulangan Bencana serta Tata Ruang,
8.	Kesehatan	8.	Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik
9.	Air Bersih	9.	Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Pariwisata, melalui Kreativitas dan Inovasi Teknologi serta Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga
10.	Ketenagakerjaan dan Kependudukan	10.	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, melalui penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia serta peningkatan kesalehan sosial.
11.	Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		
12.	Lingkungan		
13.	Pariwisata		
14.	Energi dan Sumber Daya Mineral		
15.	Kesenian, Kebudayaan dan Olahraga		

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas terkait, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Penjelasan Program Pembangunan Daerah

No	Prioritas pembangunan	Program/Pembangunan
1.	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Menengah 4. Program Pendidikan Non Formal 5. Program Pendidikan Luar Biasa 6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 8. Program pengelolaan dana spesifik grand bidang pendidikan 9. Program Penyelenggaraan Pendidikan Akper 10. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
2.	Peningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan.	1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pengembangan Obat dan Makanan 4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 9. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 10. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 11. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 12. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 13. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 14. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 15. Program pengelolaan dana spesifik grand bidang kesehatan 16. Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD 17. Program Pengadaan,Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/SSP/RSM
3.	Perluasan Lapangan Kerja.	1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 4. Program Transmigrasi Regional
4.	Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Daerah Tertinggal serta Peningkatan Peran Perempuan dan Pengarusutamaan Gender.	1. Program Keluarga Berencana 2. Program Pengendalian Penduduk Dan Advokasi. 3. Program Kesehatan reproduksi Remaja 4. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 5. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat

No	Prioritas pembangunan	Program/Pembangunan
		6. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 7. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 8. Program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera 9. Program Pengembangan Model Operasional Bkb - Posyandu -Paud (Taman Posyandu) 10. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan tumbuh Kembang Anak 11. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 12. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 13. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 14. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender dalam Pembangunan 15. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 16. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 17. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 18. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 19. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti jompo 20. Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit sosial (Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) 21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 22. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 23. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 24. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 25. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
5.	Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis	1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian 4. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan 5. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 6. Program Pengembangan Sarana/ Prasarana Pembangunan Pertanian/ Perkebunan 7. Program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan 8. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 9. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 10. Program pemberdayaan penyuluh pertanian, perkebunan dan kehutanan 11. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 12. Program peningkatan produksi hasil peternakan 13. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 14. Program peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan sumberdaya laut 15. Program pengembangan budidaya perikanan 16. Program pengembangan perikanan tangkap 17. Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan 18. Program optimalisasi pengelolaan pemasaran produksi perikanan 19. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air

No	Prioritas pembangunan	Program/Pembangunan
		Payau dan Air Tawar
6.	Pemerataan dan Pertumbuhan perekonomian melalui: Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peningkatan Investasi dan Daya Saing Industri	1. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 3. Program Pengembangan sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM 4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 7. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 8. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 9. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 10. Program Pembinaan PKL dan Asongan 11. Program Peningkatan Pasar 12. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 13. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 14. Program Penataan struktur Industri 15. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
7.	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Penyediaan Energi dan Kelestarian Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Penanggulangan Bencana serta Tata Ruang,	1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 3. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 4. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 6. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 7. Program penyediaan dan pengolahan air baku 8. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limba 10. Program pengendalian banjir 11. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 12. Program pembangunan infrastruktur perdesaan 13. Program Pengaturan Jasa Konstruksi 14. Program Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 15. Program Pengembangan dan Implementasi Kegiatan Ke-PU-an 16. Program Pembangunan Infrastruktur 17. Program Pengembangan Perumahan 18. Program Lingkungan Sehat Perumahan 19. Program Pemberdayaan Komunikasi Perumahan 20. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 21. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam /Sosial 22. Program Pengelolaan Areal Pemakaman 23. Program Pengembangan data/informasi 24. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 25. Program perencanaan pembangunan daerah 26. Program perencanaan pembangunan ekonomi 27. Program perencanaan sosial budaya 28. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 29. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan

No	Prioritas pembangunan	Program/Pembangunan
		Pembangunan Daerah 30. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 31. Program rehab Dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 32. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 33. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 34. Program Pengendalian dan Pengaman Lalu Lintas 35. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 36. Program Peningkatan Komunikasi Informasi Perhubungan Udara dan Perkeretaapian 37. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 38. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan 39. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 40. Program Pengendalian dan Pengawasan ESDM 41. Program Pengembangan dan Pengelolaan Kelistrikan, Energi dan Mineral 42. Program Pengembangan dan Pemerataan Sumber Energi 43. Program Pengembangan potensi Geologi Lingkungan dan Bencana Geologi 44. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 45. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 46. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 47. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 48. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 49. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 50. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 51. Program Perencanaan Tata Ruang 52. Program Pemanfaatan Ruang 53. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 54. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 55. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 56. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 57. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana 58. Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar Dalam Tanggap Darurat 59. Program Pemulihan Pasca Bencana 60. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Bencana
8.	Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 7. Program Pendidikan Kedinasan 8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 9. Program Penelitian dan Pengkajian Masalah-Masalah

No	Prioritas pembangunan	Program/Pembangunan
		Strategis Daerah 10. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 11. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 12. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 13. Program Kerjasama Informasi dan Mass Media 14. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 15. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan 16. Program Penataan Administrasi Kependudukan 17. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 18. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 19. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah 20. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 21. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 22. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 23. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan 24. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 25. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 26. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 27. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 28. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 29. Program Penyelematan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah 30. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Daerah 31. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Arsip 32. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 33. Program Penataan Perundang-Undangan 34. Program Perencanaan Pembangunan 35. Program Penataan Daerah otonomi Baru 36. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
9.	Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Pariwisata, melalui Kreativitas dan Inovasi Teknologi serta Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga	1. Program Pengembangan Nilai Budaya 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 5. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 6. Program peningkatan peran serta kepemudaan 7. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 8. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 9. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 10. Program Peingkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 11. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 12. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 13. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
10.	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, melalui penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan

No	Prioritas pembangunan	Program/Pembangunan
	serta peningkatan kesalehan sosial.	tindak kriminal 3. Program pengembangan wawasan kebangsaan 4. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 5. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga ketertiban dan Keamanan 6. Program Pendidikan Politik Masyarakat 7. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Penjelasan lebih lanjut tentang indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2015 yang meliputi indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Tujuan

- 1) Meningkatnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun, saling menghormati dan demokratis, dengan indikator kinerja:

No	Indikator Kinerja	Prediksi	Satuan
		2015	
1	Angka kriminalitas	360	Kejadian
2	Kejadian gangguan tramtib	117	Kejadian

- 2) Terwujudnya pelayanan publik yang adil dan merata, dengan indikator kinerja:

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan
		2015	
1	Persentase unit pelayanan yang melakukan survey IKM	100	%
2	Persentase SKPD yang memiliki Standar Pelayanan Publik (SPP)	100	%
3	Persentase SKPD yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM)	100	%

- 3) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat, dengan indikator kinerja:

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan
		2015	
1	Pertumbuhan ekonomi	7,11	%
2	Pendapatan per kapita	13.465.145,24	Rp
3	Angka pengangguran	34,89	%

- 4) Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar dengan indikator kinerja:

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan
		2015	
1	Indeks Pembangunan Manusia	76,99	indeks

b. Indikator Kinerja Sasaran

Indikator kinerja sasaran disusun menurut urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rincian indikator kinerja untuk masing-masing urusan pemerintahan dan SKPD yang melaksanakan adalah sebagai berikut:

1) URUSAN PENDIDIKAN				
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Satuan	SKPD Pelaksana
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	150	%	Dinas Pendidikan
2.	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	100	%	
3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	97,5	%	
4.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	77,6	%	
5.	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/ MA/Paket C	100	%	
6.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,02	%	
7.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,2	%	
8.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0	%	
9.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00	%	
10.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00	%	
11.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100,00	%	
12.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99,30	%	
13.	Angka Melanjutkan (AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100,00	%	
14.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	100,00	%	

2) URUSAN KESEHATAN				
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Satuan	SKPD Pelaksana
1	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	95,00	%	Dinas kesehatan RSUD Ibnu Sina
2	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80,00	%	
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95,00	%	
4.	Cakupan Pelayanan Nifas	95,00	%	
5.	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani	80,00	%	
6.	Cakupan Pelayanan Anak Balita	90,00	%	
7.	Cakupan Kunjungan Bayi	90,00	%	
8.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100,00	%	
9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC (BTA+)	80,00	%	
10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100,00	%	

No	Indikator Kinerja	Target 2015	Satuan	SKPD Pelaksana
11	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	100,00	%	
12	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100,00	%	
13	Cakupan Balita yang Mendapat Vitamin A	90,00	%	
14	Persentase Rumah Sehat	86,00	%	
15	Ketersediaan Obat Sesuai Kebutuhan	98,46	%	
16	Pengadaan Obat Esensial	99,19	%	
17	Pengadaan Obat Generik	99,55	%	
18	Cakupan Rawat Jalan	15,00	%	
19	Cakupan Rawat Inap	5,00	%	
20	Cakupan Rumah Tangga Sehat	75,00	%	
21	Posyandu Purnama	80,00	%	
22	Pelayanan pasien jamkesmas dan jamkesda	0,59	%	
23	Bed Occupancy Rate	71,03	%	
24	Average Lenght Of Stay	4,00	hari	
25	Turn Over Internal	1,10	hari	
26	Bed Turn Over	47,33		

3) URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Satuan	SKPD Pelaksana
1	Luas Lahan Kritis	2.873	Ha	Badan Lingkungan Hidup
2	Rasio Luas Kawasan lindung	11	%	
3	Persentase jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	400		

		500		
4	Persentase jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	80,00%	%	
		200		

5	Luas RTH Perkotaan	500		
		40,00%	%	
		66		
6	Penanganan sampah	805,60	m3	

		873,33	m3	
7	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	92%		
		396	m3	
		1.326.222	penduduk	
8	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	0,030	M3/penddk	
		100	%	

Urusan Pekerjaan Umum				
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Satuan	SKPD Pelaksana
1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	74,00	%	Dinas Pekerjaan Umum Setda (Bag. Adm. Pembangunan)
2	Jembatan kabupaten dalam kondisi baik	96,28	%	
3	Panjang Jalan Poros Desa Yang Terbangun	100,00	%	
4	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	55,00	%	
5	Panjang saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik	95,23	%	

Urusan Tata Ruang				
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Satuan	SKPD Pelaksana
1	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	8.910,74 Ha (30,93 %)	%	Badan Lingkungan Hidup Bappeda
2	Keberadaan Perda RTRW	ada	ada/tidak	
3	Perubahan pemanfaatan fungsi kawasan RTRW	ada	ada/tidak	

Urusan Perencanaan Pembangunan				
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Satuan	SKPD Pelaksana
1	Ketersediaan RPJPD	ada	ada/tidak	Bappeda
2	Ketersediaan RPJMD	ada	ada/tidak	
3	Ketersediaan RKPD	ada	ada/tidak	
4	Program RKPD yang diakomodasi dalam APBD	95%	%	

Urusan Perumahan				
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Satuan	SKPD Pelaksana
1	Rumah tangga pengguna air bersih	80,00	%	Dinas PU
2	Lingkungan pemukiman kumuh	13	%	
3	Rumah layak huni	92	%	

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga				
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Satuan	SKPD Pelaksana
1	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	100,00%	%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Setda (Bag. Adm. Kesra)
2	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	2	Unit	
3	Lapangan Olah Raga	27	unit	
4	Persentase cabang olah raga yang aktif	96,55%	%	

Urusan Penanaman Modal				
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Satuan	SKPD Pelaksana
1	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN	894,00	milyar rupiah	Badan Penanaman Modal dan Perijinan
2	Persentase Penyelesaian Permohonan :			
-	Ijin Lokasi	100	%	
-	Ijin Pertambangan Daerah (SIPD)	100	%	
-	Ijin Gangguan (HO)	100	%	
-	Ijin Mendirikan Bangunan	100	%	
-	Ijin Prinsip	100	%	
-	Ijin Usaha	100	%	

Urusan Koperasi dan UKM				
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Satuan	SKPD Pelaksana
1	Koperasi aktif	95	%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	Usaha Mikro dan Kecil	64	%	
3	Koperasi yang mendapatkan penilaian baik	83	%	

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Satuan	SKPD Pelaksana
1	Kepemilikan KTP	96,00%	%	Dinas Kependudukan dan Capil
2	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	96,62%	%	
3	Pengurusan KTP	1	Hari	

Urusan Ketenagakerjaan				
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Satuan	SKPD Pelaksana
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	67,84	%	Dinas Tenaga Kerja
2	Pencari kerja yang ditempatkan	31,43	%	
3	Angka pengangguran penduduk usia 15-24 tahun	22,01	%	
4	Kepatuhan terhadap Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	70,97	%	
5	Kepatuhan Terhadap Norma kerja	92,80	%	
6	Kepatuhan Terhadap Norma Jaminan Sosial Tenaga kerja	99,58	%	
7	Angka Kecelakaan Kerja	2,17	%	
8	Angka Penuntasan/ penyelesaian perselisihan hubungan industrial	100,00	%	
9	Pemberlakuan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Sama	9,00	%	
10	Kepatuhan atas ketentuan mengenai Kepemilikan Lembaga Kerjasama Bipartit	4,24	%	

Urusan Ketahanan Pangan				
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Satuan	SKPD Pelaksana
1	Regulasi ketahanan pangan	Ada	ada/tidak	Kantor Ketahanan Pangan
2	Ketersediaan pangan	200,17	kg/kapita/tahun	
3	Rata-rata konsumsi bahan pangan utama	94,35	kg/kapita/tahun	

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Satuan	SKPD Pelaksana
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan P2T-P2A	100	%	Kantor KB dan Pemberdayaan Perempuan
2	Cakupan anak korban kekerasan yang tuntas mendapatkan penanganan pengaduan	95	%	
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	%	
4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas yang mampu terlaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	%	
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan	90	%	
6	Cakupan lembaga perempuan dan anak yang terfasilitasi	50	%	

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera				
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Satuan	SKPD Pelaksana
1	Prevalensi peserta KB Aktif	78,55	%	Kantor KB dan Pemberdayaan Perempuan
2	Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun	1,10	%	
3	cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmeet need)	21,15	%	
4	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	21,75	%	
5	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Di Setiap Desa/Kelurahan	100,00	%	

Urusan Perhubungan				
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Satuan	SKPD Pelaksana
1	Persentase ketersediaan angkutan darat	11654	kendaraan	Dinas Perhubungan Setda (Bag. Adm. Perkonomian)
		407755	penumpang	
		0,03	%	
2	Persentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	400	buah	
		400	buah	
		0,50	%	
3	Persentase angkutan umum darat dalam kondisi layak jalan	238	kendaraan	
		596	kendaraan	
		0,40	%	
4	Ketersediaan angkutan laut (penyeberangan)	106615	kapasitas kapal	
		370	penumpang	
5	Pembangunan Bandara Domestik di Pulau Bawean	100	%	
6	Persentase Permasalahan Bidang Perhubungan yang Diselesaikan	100	%	

Urusan Komunikasi dan Informatika				
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Satuan	SKPD Pelaksana
1	Keberadaan Website Pemerintah Daerah	ada	ada/tidak	Setda (Bagian PDTI, Bagian Humas, Bagian Umum)
2	Pengunjung Website setiap tahun	665.113	netter	
3	Sistim informasi yang tersedia	27	buah	
4	Jumlah pemberitaan di media	420	kali	
5	Persuratan secara elektronik	Ada	ada/tidak Ada	

Urusan Pertanahan				
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Satuan	SKPD Pelaksana
1	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	1/1	%	Setda (Bag. Adm. Pemerintahan)

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Satuan	SKPD Pelaksana
1	Jumlah Parpol yang dibina	11	parpol	Kantor Kesbangpolinmas Satpol PP Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Jumlah LSM/ Ormas/ OKP yang dibina	164	LSM/OKP	
3	Konflik yang dapat diselesaikan	100%	%	
4	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dalam rangka penegakan PERDA di Kab. Gresik	80,00%	%	
6	Demo / protes terhadap PERDA/Perbup	100,00%	%	
7	Keberadaan PERDA tentang Penyelenggaraan Trantibum	Ada	ada/tidak	
7	Keberadaan PERDA tentang PSK dan Miras	Ada	ada/tidak	
8	Rasio Satpol PP terhadap jumlah penduduk	0,05%	Per 10.000 penduduk	
9.	Sistem Pengendalian dan penanggulangan bencana alam	Ada	Ada/tidak	

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Satuan	SKPD Pelaksana
1	Perda yang ditetapkan	10	Perda	Setda (Bag. Hukum, Bag. Humas, Bag. Ortala, Bag. Adm. Pemerintahan Umum, Bag. Perlengkapan, Bag. Adm. Perekonomian) Set DPRD DPPKAD BUMD BKD Inspektorat
2	Jumlah Perda yang dibatalkan	0	Perda	
3	Kasus hukum yang diselesaikan	4/5	%	
4	Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti	100	%	
5	Peraturan Bupati yang ditindak lanjuti	100	%	
6	Persentase rekomendasi temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100	%	
7	Persentase LAKIP SKPD yang dievaluasi	11/44	%	
8	Prosentase informasi masyarakat yang ditindak lanjuti	100	%	
9	Konsultasi Pemerintahan Kabupaten dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah	34	Kali	
10	Hasil Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKK LPPD)	BAIK	-	
11	Opini laporan keuangan	WTP	-	
12	Laporan keuangan tersusun tepat waktu	YA	ya/tidak	
13	APBD ditetapkan tepat waktu	TEPAT	tepat/tidak	
14	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	ADA	ada/tidak	
15	Peningkatan PAD	6,68	%	
16	Keberadaan kemandirian daerah	26,17	%	
17	Perusahaan Daerah dalam kondisi sehat	3	Buah	
18	Asset (Bangunan yang dipelihara dan dimanfaatkan)	99,50	%	
19	Voting yang dilakukan dalam sidang paripurna	0%	%	
20	keterlibatan masyarakat dalam pembahasan raperda	100	%	
21	perda inisiatif DPRD	5	Perda	
22	Rasio pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai jenjangnya	100,00	%	
23	Rasio jabatan yang terisi	100,00	%	
24	Rasio Pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal	100,00	%	
25	Rasio Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	100,00	%	
26	Kesesuaian SOTK SKPD dengan Pedoman / Peraturan tentang SOTK	100,00	%	
27	Persentase SKPD yang telah dilakukan analisa jabatan	100,00	%	
28	Jumlah MOU Kerjasama dengan Daerah Lain dan Pihak Ketiga	28	Buah	
29	Keberadaan unit pelayanan pengadaan	Ada	Ada/Tidak	
30	Keberadaan E-procurement	Ada	Ada/Tidak	
31	Petugas yang lulus ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa Pemerintah	25	Orang	

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Satuan	SKPD Pelaksana
1	PKK aktif	85,61	%	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
2	Posyandu Aktif	98,30	%	
3	Persentase keluarga miskin	19,28	%	

Urusan Sosial				
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Satuan	SKPD Pelaksana
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	20	unit	Dinas Sosial Setda (Bag. Adm. Kesra)
2	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	439	PMKS	
3	Jumlah PMKS	65.122	Jiwa	
4	Bantuan santunan Kematian	100%	%	
5	Penyaluran Raskin	100%	%	
6	Jumlah hari besar yang dirayakan	5	kali	
7	Bantuan sarana ibadah	90%	%	

Urusan Kebudayaan				
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Satuan	SKPD Pelaksana
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	9	Event.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	9	Unit	
3	Peninggalan / Cagar Budaya (Situs) yang dilestarikan	36,36%	%	

Urusan Statistik				
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Satuan	SKPD Pelaksana
1	Keberadaan dokumen "Gresik Dalam Angka"	ada	ada/tidak	Bappeda
2	Keberadaan dokumen "PDRB"	ada	ada/tidak	
3	Keberadaan dokumen "IPM"	ada	ada/tidak	

Urusan Kearsipan				
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Satuan	SKPD Pelaksana
1	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	412/413	%	Kantor Perpustakaan dan Arsip

Urusan Perpustakaan				
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Satuan	SKPD Pelaksana
1	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	179.142	buku	Kantor Perpustakaan dan Arsip
2	Pengunjung perpustakaan	759,805	orang	
3	Jumlah anggota perpustakaan	33.300	orang	

Urusan Perikanan dan Kelautan				
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Satuan	SKPD Pelaksana
1	Produksi Perikanan :			Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Badan Pelaksana Penyuluh
a	Budi Daya :			
	- Udang Windu	3.100,00	ton	
	- Udang Vannamae	4.250,00	ton	
	- Bandeng	39.000,00	ton	
	- Kerapu	12,00	ton	
	- Nila	1.200,00	ton	
b	Penangkapan	17.800,00	ton	
c	Perairan Umum	750,00	ton	
2	Produktivitas Lahan Tambak :			
	Payau	106,91	ton/Ha	
	Tawar	123,13	ton/Ha	

Urusan Pertanian				
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Satuan	SKPD Pelaksana
1	Produksi Pertanian :			Dinas Pertanian Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Badan Pelaksana Penyuluh
	Padi	400.434	ton	
	Jagung	109.286	ton	
	Kedelai	3.463	ton	
	Kacang Tanah	5.141	ton	
	Kacang Hijau	2.216	ton	
	Ubi Kayu	28.499	ton	
	Ubi Jalar	5.940	ton	
2	Produksi Sayur :			
	Bawang Merah	3.484	ton	
	Sawi	610	ton	
	Kacang Panjang	522	ton	
	Cabe	804	ton	
	Tomat	373	ton	
	Terong	9.093	ton	
	Ketimun	806	ton	
	Labu Siam	610	ton	
	Kangkung	1.190	ton	
	Bayam	627	ton	
3	Produksi Buah :			
	Jambu Biji (Kw)	5.494		
	Jeruk (Kw)	1.921		
	Mangga (Kw)	328.505		
	Pepaya (Kw)	8.732		
	Pisang (Kw)	178.904		
	Blimbing (Kw)	2.396		
	Sawo (Kw)	1.144		
	Sirsak (Kw)	978		

No	Indikator Kinerja	Target 2015	Satuan	SKPD Pelaksana
4.	Produksi Perkebunan:			
	Tembakau	12	ton	
	Tebu	8.226	ton	
	Kelapa	3.900	ton	
	Cengkeh	32	ton	
	Kopi	52	ton	
	Jambu Mete	126	ton	
	Kapuk Randu	58	ton	
	Kakao	4	ton	
	Kunyit	930	ton	
	Siwalan	937	ton	
5.	Produksi Peternakan:			
	Daging	15.606,12	ton	
	Telur	2.991,97	ton	
	Susu	543,36	ton	
6.	Populasi Ternak :			
	Sapi Potong	53.281	ekor	
	Sapi Perah	1.546	ekor	
	Kerbau	334	ekor	
	Kambing	53.355	ekor	
	Domba	30.749	ekor	
	Kuda	373	ekor	
	Ayam Buras	667.109	ekor	
	Ayam Ras Petelur	132.441	ekor	
	Ayam Ras Pedaging	2.258.400	ekor	
	Itik	26.034	ekor	
	Entok	13.710	ekor	

Urusan Kehutanan				
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Satuan	SKPD Pelaksana
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	<u>100</u>		Dinas Pertanian
		7429,07		
		0,013	%	
2	Produksi hasil Hutan :			
	- Kayu Jati	415	m3	
	- Non Kayu Jati	40	m3	

Urusan Energi Sumber Daya Mineral				
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Satuan	SKPD Pelaksana
1	Persentase ABT berijin yang membayar pajak	75,20	%	Setda (Bag. Adm. SDA)

Urusan Pariwisata				
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Satuan	SKPD Pelaksana
1	Jumlah kunjungan wisata	1.530.000	orang	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Urusan Perindustrian				
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Satuan	SKPD Pelaksana
1	Pertumbuhan industri	6.605-6.525		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		6525		
		2	%	
2	Pertumbuhan Nilai Produksi	4	%	

Urusan Perdagangan				
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Satuan	SKPD Pelaksana
1	Pertumbuhan Penerbitan SIUP	11,8	%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Setda (Bag. Adm. Perekonomian)
2	Pertumbuhan penerbitan TDP	10,7	%	
3	Pertumbuhan penerbitan TDG	17,40	%	
4	Pertumbuhan nilai investasi perdagangan	1,7	%	
5	Jumlah Pameran / Ekspo Per Tahun	3	Even	

Urusan Ketransmigrasian				
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Satuan	SKPD Pelaksana
1	pembinaan calon transmigran	50	orang	Dinas Tenaga Kerja

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan kode rekening, nama program kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana meliputi lokasi, target pencapaian kinerja dan kebutuhan dan/pagu indikatif, catatan penting serta prakiraan maju tahun rencana yang meliputi capaian kerja dan kebutuhan pagu indikatifnya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matriks rencana program dan kegiatan prioritas seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

RKPD 2015 Kabupaten Gresik merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Gresik yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan tahun 2013 dan proyeksi evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2014. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisisnya sebagai bahan perencanaan untuk dapat memecahkan permasalahan pembangunan secara bertahap, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik tahun 2015 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

Rencana penganggaran belanja tahun 2015. sebesar Rp2.400.000.000.000,00 yang dipergunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp1.208.000.000.000,00 dan belanja langsung sebesar Rp1.192.000.000.000,00, yang bersumber dari APBD Kabupaten Gresik. Sedangkan usulan pembangunan yang dibiayai APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp174.839.000.000,00, APBN sebesar 582.700.877.850, dan CSR sebesar Rp900.000.000,00. Anggaran tersebut adalah kebutuhan total dari seluruh SKPD sebagaimana rincian berikut :

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2015 ini merupakan implementasi tahun ke keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 yang memuat visi, misi, dan program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ini, secara umum didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Sedangkan secara substansi dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2015 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2015 juga melibatkan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (stakeholder) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan, Musrenbang di Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang berfungsi sebagai forum untuk menjaring aspirasi, penyelarasan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015.

Usulan program/kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2015 telah

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain pembiayaannya diusulkan ke APBD Pemerintah Kabupaten Gresik, juga diusulkan ke APBD Propinsi Jawa Timur dan ke Pemerintah Pusat melalui APBN maupun partisipasi masyarakat.

Dokumen RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2015 menjadi pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2015 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015 untuk penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2015 yang dijabarkan kedalam.

Adapun Kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Setelah ditetapkan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2015, dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas masing-masing SKPD melakukan penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2015 menjadi Rencana Kerja SKPD Tahun 2015 dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2015 yang telah ditetapkan.
2. Dalam upaya konsistensi dan keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015.
3. Pendanaan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015, selain menjadi beban pemerintah daerah juga diharapkan adanya partisipasi masyarakat dan dunia usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat diselenggarakan bersama-sama antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.
4. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama pelaksanaan program/kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015, diharapkan dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau menyeluruh sehingga partisipasi tersebut bukan sekedar formalitas namun dilaksanakan secara

sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik berkewajiban untuk melakukan pengendalian perumusan kebijakan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015, Pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2015 dan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014.

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.